Pengurus Pusat VOC dan lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia (1619-1811) – sebuah pendahuluan

Dr. Hendrik E. Niemeijer

Diterjemahkan oleh Dr. Th. van den End

I. Pendahuluan

Pada tanggal 30 Mei 1619 VOC merebut pelabuhan Jakatra di pantai utara Pulau Jawa. Dengan demikian Kompeni memperoleh sebuah pelabuhan permanen dan mendapat galangan kapal, gudang-gudang pusat untuk kegiatan perdagangan, serta pusat pemerintahan dan administrasi. Mulai saat itu di Jakatra, yang kemudian dinamakan Batavia, berkedudukan pemerintah pusat VOC di Asia, yakni gubernur jenderal dan anggota *Raad van Indië* (Dewan Hindia), yang dalam dokumen-dokumen biasanya disebut *Hoge Regering* (Pemerintah Agung/Pusat). Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan rumah-rumah para pegawai Kompeni, dari yang berpangkat paling tinggi sampai yang paling rendah, semuanya terpusat dalam satu kompleks yang dijaga ketat, yaitu *Kasteel* (Benteng) Batavia. Benteng itu dibongkar pada masa Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811). Pada tanggal 17 September 1811 pengganti Daendels, Gubernur Jenderal J.W. Janssens, menandatangani kapitulasi kepada tentara Inggris. Maka tahun ini merupakan titik akhir kurun waktu yang dibahas dalam Pendahuluan ini.[1]

Inventaris menyeluruh ini terutama mencakup arsip-arsip yang pada zaman VOC disimpan dalam *Kasteel*. Pada masa jabatan Daendels sejumlah besar dokumen dari *Kasteel* dibuang, tetapi banyak juga yang masih tersimpan hingga sekarang. Dalam bagian pendahuluan ini kami menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan dan dewan-dewan kota serta metode kerjanya.[2] Dalam pasal II kami akan membahas lembaga-lembaga sentral di bidang pemerintahan dan peradilan dalam *Kasteel* Batavia, yaitu:

1. *Hoge Regering* (Pemerintah Agung, 1609-1811);
2. *Hoge Commissie* (Komisi Tinggi, 1791-1799);
3. *Algemene Rekenkamer* (Badan Umum Pengawas Keuangan, 1808-1811);
4. *Raad van Justitie* (Dewan Peradilan, 1620-1809).

Selanjutnya akan dibahas lembaga-lembaga pemerintahan kota. Batavia mempunyai beberapa lembaga yang fungsinya sama dengan lembaga serupa yang terdapat di kota-kota besar daerah Holland. Dalam arsip, lembaga-lembaga ini biasanya dinamakan *colleges* (dewan). Nama ini akan dipakai juga dalam Inventaris menyeluruh ini. Pada tahun 1642 cara *colleges* ini berfungsi dicatat dalam sejumlah peraturan yang panjang lebar berjudul *Bataviase Statuten*. Di kemudian hari *Statuten* ini diterbitkan dalam *Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek*, Jilid I.[3] Pada zaman berikutnya *Hoge Regering* terus menambah dan mengubah-ubah *Statuten* tersebut, sehingga akhirnya ditetapkan edisi baru dengan nama *Nieuwe Bataviase Statuten* (Statuta Batavia yang Baru, 1766). Edisi baru ini diterbitkan sebagai Jilid IX *Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek*. Peraturan-peraturan baru itu (kendati tidak pernah diberlakukan secara resmi) merupakan introduksi terbaik untuk penelitian prosedur dan aturan yang mengalami perubahan sesudah tahun 1642. Para ilmuwan yang ingin melakukan penelitian dalam arsip-arsip lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia sebaiknya membaca lebih dahulu Statuta Baru tahun 1766 itu.

Sesudah *colleges* kota Batavia menyusullah para notaris yang berkedudukan di kota itu. Sebab, protokol-protokol notaris biasanya disusun untuk memenuhi kebutuhan lembaga-lembaga dan *colleges* kota. Maka pasal III disusun sebagai berikut:

1. *College van Schepenen* (Pengadilan bagi Golongan Swasta, 1620-1809);
2. *College van Weesmeesters* (*Weeskamer*, Dewan Pengurus/Balai Yatim Piatu, 1624-1885);
3. *College van Heemraden* (lembaga yang memerintah *Ommelanden*, 1664-1809);
4. *College van Huwelijkse en Kleine Gerechtszaken* (Pengadilan bagi Urusan Perkawinan dan Perkara Pengadilan yang Ringan, 1656-1812);
5. *College van Boedelmeesters van Chinese en andere Onchristen Sterfhuizen* (*Boedelkamer*, Dewan Pengurus/Balai Harta Peninggalan Orang Cina dan Rumah Tangga Orang bukan Kristen lain, 1640-1885).
6. Para Notaris (1620-1822)

Secara formal, *Colleges* kota Batavia ini tunduk pada *Hoge Regering*. Meski demikian, dalam praktik sehari-hari mereka sedikit banyak mandiri dalam pelaksanaan tugasnya. Secara tidak resmi pengaruh gubernur jenderal besar sekali.

Kehendaknya harus dipatuhi. Secara resmi *Hoge Regering* berpengaruh langsung terhadap pemilihan anggota-anggota *colleges* yang baru, sebab pemerintahlah yang mengangkat mereka. Keputusan-keputusan yang diambil oleh *colleges* itu pun tunduk pada penilaian akhir oleh *Hoge Regering*. Selain itu, *colleges* tersebut harus setiap tahun mempertanggungjawabkan keuangannya kepada pemerintah itu. Namun, sebagaimana telah dikatakan di atas, dalam praktik sehari-hari *colleges* dapat bertindak dengan bebas, karena *Hoge Regering* tentunya tidak dapat mencampuri setiap vonis, pengikatan perkawinan, surat wasiat, dan seterusnya.

Hanya para notaris, yang jumlahnya di Batavia cukup besar, yang menampilkan diri lebih sebagai pengusaha swasta. Namun, agar dapat melaksanakan jabatannya mereka memerlukan izin *Hoge Regering*. Mereka diawasi juga oleh *Raad van Justitie*. Protokol-protokol mereka yang masih tersimpan, yang berisikan sejumlah besar kontrak antara sesama warga kota, memberi gambaran yang jelas mengenai kegiatan wirausaha dan tentang masyarakat kolonial yang multi-etnik itu.

Dalam pasal IV dibahas lembaga-lembaga getejhwi, yaitu:

1. *Kerkenraad* (Majelis Gereja) Gereformeerd (Calvinis) Batavia, yang mengurus jemaat-jemaat berbahasa Belanda, Portugis, dan Melayu di sana (berdiri 1621);
2. *College van Diakenen* (Dewan Diaken-diaken, 1648);
3. *College van Kerkmeesters* (Dewan Wali Gereja, 1655);
4. *Kerkenraad* Gereja Gereformeerd di Semarang (1753);
5. *Kerkenraad* Lutheran di Batavia (1746).

Lembaga-lembaga gerejawi ini masing-masing membentuk arsip tersendiri. Arsip majelis gereja Semarang dulunya disimpan dalam gedung gereja Protestan setempat, yang dibangun pada abad ke-18. Gedung ini masih tetap berdiri sampai sekarang. Tidak diketahui kapan notula majelis gereja Semarang dipindahkan ke Batavia. *College van Kerkmeesters*, yang diangkat oleh *Hoge Regering*, resminya bukan badan gerejawi, tetapi bersifat sekuler. Para wali gereja bertanggung jawab atas pengelolaan gedung-gedung gereja dan harta milik gereja lainnya; mereka bertugas mengurus pemakaman, dan harus melakukan pengawasan terhadap semua pekuburan. Kelima lembaga tersebut mengurus pula buku-buku pembaptisan, perkawinan, dan pemakaman. Di kemudian hari, arsip-arsip mereka dimasukkan ke dalam Arsip Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*).

Dalam pasal V dibahas semua lembaga dan tokoh lainnya, yaitu:

1. *Amfioen Sociëteit* (Sositet Candu, 1745-1794) dan *Amfioen Directie* (1794-1808);
2. *Bataviase Bank van Lening* (Pegadaian, 1746-1752); *Bank-Courant en Bank van Lening* (1752-1794); *Bank van Lening* (1794-1818);
3. *Collectie Engelhard* (Koleksi Engelhard). Koleksi ini berisikan arsip-arsip Nicolaas Engelhard, gubernur pantai timurlaut Pulau Jawa (1801-1808).

II. Pengurus pusat VOC di Batavia

1. *Hoge Regering* (Pemerintah Agung, 1609-1811)

Hoge Regering atau Pemerintah Agung berdiri dengan pengangkatan Pieter Both menjadi pemimpin tertinggi seluruh perusahaan VOC di Asia dengan gelar *gouverneur-generaal* (resolusi *Staten-Generaal* bertanggal 27 November 1609). Sesuai dengan instruksinya Both segera membentuk sebuah dewan penasihat bernama *Raad van Indië* (Dewan Hindia) yang mula-mula beranggotakan lima orang, mulai tahun 1617 sembilan orang.[4] Kesembilan anggota tersebut bertugas 'mendampingi gubernur jenderal dalam semua urusan, dan dalam kepemimpinan umum di bidang perdagangan, peperangan, dan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan peradilan dalam semua perkara perdata dan pidana'. Secara bersama, gubernur jenderal dan *Raad van Indië* merupakan *Hoge Regering* (Pemerintah Agung, pucuk pimpinan VOC di Asia).

Sesuai dengan instruksi *Heren Zeventien* (Tuan-tuan nan 17, pimpinan tertinggi VOC di negeri Belanda), pada tahun 1619 Gubernur Jenderal Jan Pietersz Coen menjadikan Jakatra sebagai tempat berkedudukannya pemerintahan VOC di Asia. Sebelumnya gubernur jenderal biasanya tinggal di Banten atau di Ternate. Langsung sesudah pendudukan kota Jakatra (30 Mei 1619) *Hoge Regering* menetap di sana. Dalam pelaksanaan tugasnya *Hoge Regering* itu didampingi oleh *Algemene Secretarie* (Sekretariat Umum), yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang menghadiri rapat-rapat *Raad van Indië* dan menulis resolusi-resolusi badan itu. Ia didampingi oleh seorang juru tulis I, yang berpangkat *opperkoopman* (saudagar besar), dan beberapa juru tulis biasa serta juru tulis luar biasa. Jumlah juru tulis bertambah terus dari 14 orang pada tahun 1660 menjadi 70 orang pada akhir zaman VOC (1799). Tiap-tiap juru tulis biasa harus melakukan bagian tertentu tugas administrasi, umpamanya mengarang *Daghregister van Batavia* (catatan-catatan harian kota Batavia), membuat salinan buku-buku resolusi, mengarang resolusi atau notula, mendaftarkan surat-surat

masuk, dan menyusun berbagai daftar serta indeks.

Pekerjaan tulis-menulis di *Kasteel* Batavia banyak sekali. Pekerjaan ini mengalami puncak kesibukan beberapa kali dalam setahun, seperti dalam bulan-bulan menjelang akhir tahun, saat keberangkatan kapal-kapal yang hendak kembali ke negeri Belanda. Pada waktu itu beberapa peti yang penuh dengan surat-surat dan dokumen-dokumen perlu dipersiapkan untuk dikirim kepada *Heren Zeventien* dan *kamer-kamer* (kantor-kantor, lihat karangan F.S. Gaastra dalam Pendahuluan ini) VOC di negeri Belanda.[5] Selama kesibukan luar biasa ini dipekerjakan juru-juru tulis luar biasa. Dengan cara itu beban kerja jajaran juru tulis biasa dikurangi. Di samping administrasi *Hoge Regering*, sekretariat itu menyelenggarakan pula korespondensi dengan *Heren Zeventien* dan *kamer-kamer* di negeri Belanda, dengan kantor-kantor di luar Batavia dan badan-badan pemerintahan lainnya di Batavia sendiri, serta dengan sejumlah raja Asia. Agar badan-badan pemerintahan di Batavia sendiri, *Heren Zeventien*, semua *kamer* VOC, kantor-kantor lain di Asia, dan *colleges* kota Batavia tetap mengetahui keputusan-keputusan *Hoge Regering*, pelbagai dokumen administratif disalin rangkap sekian seluruhnya atau sebagian, kemudian dikirim ke instansi-instansi yang bersangkutan. Pada tahun 1735 ternyata arsip tidak diurus dengan semestinya, maka pengelolaannya dipercayakan kepada seorang *archivarius*. Sebelumnya pengurusan arsip menjadi tugas sampingan pegawai-pegawai lain di Sekretariat Umum. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Daendels menghapuskan lagi jabatan archivaris.

Dalam pelaksanaan tugasnya, *Hoge Regering* sangat tergantung pada upaya sejumlah pejabat tinggi dan tenaga manajer. Pertama, *directeur-generaal*. Tokoh ini bertanggung jawab atas bagian logistik dan transpor serta perdagangan dan pelayaran kapal seluruh perusahaan VOC di Asia. Masalah-masalah penting, umpamanya penyusunan daftar pesanan barang dan dana dari negeri Belanda, harus dibicarakannya dalam *Raad van Indië*. Ia bertugas juga mengawasi perbekalan dan barang-barang dagangan yang disimpan di gudang-gudang, *soldijkantoor* (kantor administrasi personel VOC), dan kas. Ia didampingi oleh dua *opperkooplieden* dari *Kasteel*. Mulai tahun 1664 tugas mereka dibagikan: satu di antara kedua *opperkooplieden* tersebut harus melakukan administrasi barang-barang yang berasal dari kantor-kantor lain di Asia, sedangkan yang seorang lagi menyusun daftar barang-barang yang keluar. Mereka bersama-sama bertanggung jawab atas para karyawan di *negotiekantoor* (kantor perdagangan). Dalam kantor tersebut bekerja sejumlah besar pegawai dengan pangkat *koopman* (saudagar), *onderkoopman* (saudagar muda), dan penata buku.

Pejabat tinggi kedua yang perlu disebut di sini ialah *boekhouder-generaal* (kepala pembukuan). Kepala bagian akuntansi ini berada langsung di bawah *directeur-generaal*. Berdasarkan buku-buku dagang semua kantor VOC di Asia ia menyusun *generaal journaal* (jurnal umum) dan *generaal grootboek* (buku kas induk umum). Salinan kedua dokumen ini dikirim ke *Kamer* Amsterdam dan *Kamer* Zeeland. Kepala pembukuan melakukan pula administrasi muatan kapal yang diterima dari negeri Belanda dan barang-barang yang dikirim ke sana. Di kantornya disusun pula *bevindingen op de eisen*. Saat kapal-kapal dibongkar muatannya, haruslah diperiksa apakah daftar barang yang diterima sesuai dengan pesanan *Hoge Regering* dan dengan keputusan *Heren Zeventien* tentangnya. Setelah melakukan inspeksi, dicatat barang mana yang kurang dan mana yang kelebihan. Sejak bagian terakhir abad ke-17 pesanan asli dikirim ke negeri Belanda bersama dengan laporan mengenai barang yang kekurangan atau kelebihan. Laporan atau *bevindingen* ini dikirim ke negeri Belanda, dengan maksud supaya direksi di sana dapat melakukan pengusutan mengenai sebab-sebab perbedaannya.[6]

Uraian mengenai tugas *boekhouder-generaal* ini menunjukkan bahwa VOC menerapkan sistem pembukuan sentral, yang berpusat di Batavia. Hanya saja, sistem yang dipakai di Batavia tidak serasi dengan pembukuan *kamer-kamer* VOC di negeri Belanda.[7] Perusahaan di Asia dipandang sebagai *factor* (kantor) yang bertanggung jawab kepada perusahaan VOC di negeri Belanda atas semua barang yang diterimanya dari sana. Batavia menganggap perusahaan di tanah air itu sebagai satu kesatuan, sedangkan pada kenyataannya *kamer-kamer* VOC di sana masing-masing melaksanakan administrasi tersendiri. Oleh karena itu, pada rekening koran orang memakai istilah *Generale Oost-Indische Compagnie*. Maka di rekening koran ini, yang disusun di Batavia, semua barang dan dana yang telah diterima dari negeri Belanda dimasukkan ke bagian kredit, sedangkan muatan kapal yang berangkat ke sana dimasukkan ke bagian debet. Biaya yang telah dikeluarkan di Asia dibagikan atas lima pos, yaitu biaya umum, gaji, kapal-kapal, benteng-benteng, dan 'hadiah-hadiah'. Di bagian pendapatan orang membedakan pendapatan dari kegiatan dagang dan yang dari pajak dan sebagainya, yang masing-masing dinamakan *generale winsten* (keuntungan umum) dan *generale inkomsten* (pendapatan umum). Pada abad ke-18 orang menambahkan beberapa

pos di bagian masing-masing, tetapi sistemnya sendiri tidak mengalami perubahan.

Generale missiven, yang oleh *Hoge Regering* dikirim kepada *Heren Zeventien*, juga mengandung data-data mengenai keuangan VOC di Asia. Bagian yang bersangkutan disebut *generale journalen* (jurnal-jurnal umum). Tidak jarang proses penyusunan jurnal ini memakan waktu lama. Biasanya para penata buku lekas-lekas mengumpulkan hasil kegiatan kantor masing-masing, lalu untuk setiap kantor menyusun daftar pendapatan dan pengeluaran tersendiri. Daftar-daftar tersebut, yang merupakan sebagian *generale missive*, dititipkan melalui armada kapal yang berangkat ke negeri Belanda pada bulan Desember atau Februari. Buku-buku keuangan yang sebenarnya, yang sudah rampung, baru tiba di tanah air lama kemudian, bahkan sampai satu tahun sesudahnya.

Visitateur-generaal (penilik umum), yang tunduk juga kepada *directeur-generaal*, bertugas memeriksa buku-buku dan administrasi keuangan di Asia. Mula-mula ia harus memeriksa pula *consumptie-rekeningen*, yaitu pertanggungjawaban para nakhoda kapal yang baru tiba di Batavia mengenai bekal yang selama perjalanan ke sana diberikan kepada awak kapal.

Selain dalam administrasi keuangan, peranan Batavia sebagai pusat kegiatan VOC di Asia tampak juga dalam administrasi personel. *Soldijkantoor* mencatat data mengenai semua pegawai VOC di Asia. Untuk itu, setiap tahun kantor tersebut menerima informasi seperlunya dari semua kantor di Asia. Mulai tahun 1689 setiap tahun disusun daftar lengkap seluruh tenaga VOC di kawasan tersebut. Daftar ini disebut *monsterrol* dan dikirim ke negeri Belanda rangkap dua.

Di Batavia terdapat pelbagai fasilitas untuk lalu lintas kapal-kapal, seperti galangan kapal, gudang, kawasan bengkel-bengkel, dan sebagainya. Tetapi di sana tidak dibangun kapal-kapal baru. Di Pulau Onrust, pulau kecil lepas pantai Batavia, terdapat galangan untuk reparasi kapal. *Equipagemeester* (kepala bagian pelengkapan kapal) mengawasi pekerjaan merawat dan memperbaiki kapal-kapal di pelabuhan dan di Pulau Onrust. Ia hadir saat kapal-kapal tiba atau berangkat. Pada waktu keberangkatan kapal, bersama dengan salah seorang fiskal (jaksa) ia memeriksa daftar awak kapal yang bersangkutan dan muatannya.

Sampai di sini kami menggambarkan susunan dan kegiatan *Hoge Regering* selaku badan yang mengurus kegiatan dagang VOC di Asia. Tidaklah mungkin untuk dalam kerangka ini menguraikan kegiatan badan tersebut di bidang politik. Kiranya cukuplah kalau dalam kaitan ini kami menyebutkan publiksasi-publikasi sumber yang terpenting. Mulai tahun 1882, yaitu setelah *Landsarchief* yang lama sedikit banyak berhasil diatur oleh J.A. van der Chijs, orang menerbitkan seri-seri terpenting dari arsip *Hoge Regering*. Pertama, seri *Generale Missiven*, laporan-laporan panjang lebar yang oleh *Hoge Regering* dikirim kepada *Heren Zeventien*.[8] Laporan-laporan ini (yang dapat disimak juga dalam Nationaal Archief di Den Haag) menggambarkan kegiatan dagang dan politik di sejumlah daerah Asia dari sudut pandang Pemerintah Agung. Sebaiknya informasi yang terdapat di dalamnya digabungkan dengan *besoignes* (*besognes*, pertimbangan) dalam buku-buku resolusi *Hoge Regering*. Hanya sebagian *besoignes* ini yang tercakup dalam indeks-indeks yang disusun pada buku-buku resolusi tersebut (indeks-indeks ini diterbitkan dengan judul *Realia*[9]). Selama ini, para ahli yang sedang melakukan penelitian mengenai salah satu daerah sering tidak memanfaatkan buku-buku resolusi tersebut.

Sejumlah sumber lain yang termasuk arsip *Hoge Regering* sudah diterbitkan pula. Pertama, *Daghregisters van Batavia*, catatan harian yang berupa daftar kejadian yang berlangsung di bidang perdagangan, politik, dan militer serta di kota Batavia sendiri.[10] Selanjutnya terbitan *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek*, yang penting karena mengandung informasi mengenai cara penegakan peradilan di daerah jajahan dan mengenai sistem kemasyarakatan kolonial.[11] Kebijakan terhadap raja-raja di kawasan Asia dan terhadap kepala-kepala rakyat direkam dalam *Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum*, koleksi kontrak-kontrak VOC dengan raja-raja pribumi, yang amat penting.[12]

2. *Hoge Commissie* (Komisi Tinggi, 1791-1799)

Pada tanggal 23 Mei 1791 *Heren Zeventien* bersama dengan Willem V, Prins van Oranje (selaku direktur besar VOC), mengangkat dua *commissaris-generaal* (komisaris umum) untuk wilayah Hindia Belanda. Mereka adalah: Sebastiaan Cornelis Nederburgh, *eerste advocaat* (pengacara pertama) Kompeni di negeri Belanda, dan Simon Hendrik Frijkenius, seorang Kapten Angkatan Laut. Keduanya diberi tugas membentuk komisi khusus di Batavia – yang akan bernama *Hoge Commissie* – yang harus memeriksa dan menyelesaikan pelbagai ketidakberesan di bidang administrasi. Pada tanggal 19 Agustus tahun itu juga mereka menerima instruksi terinci.[13] Menurut bunyi instruksi ini mereka diberi kuasa memecat pegawai-pegawai korup dan menyerahkan mereka untuk diadili atau mengirim mereka kembali ke negeri Belanda. Di samping itu, *Hoge Commissie* dikuasakan sepenuhnya untuk mengikat kontrak-

kontrak dengan raja-raja dalam wilayah oktroi VOC. Akan tetapi, kuasa tersebut dari semula dibatasi, disebabkan gubernur jenderal yang sedang menjabat, Willem Arnold Alting, dan *directeur-generaal* H. van Stockum diangkat pula menjadi *commissaris-generaal*, sehingga mereka dengan sendirinya menjadi anggota *Hoge Commissie*.

Pada tanggal 5 November 1791 Nederburgh dan Frijkenius, dengan ditemani seorang sekretaris, naik kapal fregat 'De Amazone'.[14] Disebabkan kapal yang mereka tumpangi tidak maju-maju, baru pada tanggal 12 Juni 1792 mereka mendarat di Tanjung Harapan. Di sana mereka mencoba menyelesaikan berbagai sengketa antara para pemukim Eropa di kawasan itu dengan pegawai Kompeni mengenai ekspor hasil bumi, antara lain anggur. Mereka tinggal di Afrika Selatan selama satu tahun lebih dan mengadakan sejumlah perubahan di bidang kepegawaian.[15] Pada tanggal 2 September 1793 mereka berangkat ke Batavia; mereka tiba di sana sekitar pertengahan bulan November dan pada tanggal 15 November mereka disambut dengan meriah di *Kasteel* Batavia. Karena Van Stockum telah meninggal dunia, Gubernur Jenderal Alting mencoba memaksakan pengangkatan menantunya Siberg menjadi komisaris yang keempat. Tetapi *Heren Zeventien* menunjuk Willem Jacob van der Graaff, Gubernur Sri Lanka, sebagai *directeur-generaal* yang baru merangkap anggota *Hoge Commissie*. Sambil menantikan kedatangannya, pada tanggal 14 Desember 1793 Siberg dilantik menjadi anggota sementara *Hoge Commissie*.

Pada akhir tahun 1794 Van der Graaff tiba di Batavia dan menuntut diserahkannya kedudukan *directeur-generaal* yang memang menjadi haknya. Akan tetapi, mayoritas anggota *Hoge Commissie* tidak bersedia menerima beliau, dengan dalih ia kurang mengenal keadaan di Hindia. Baru dalam bulan Desember 1795 *Hoge Regering* meminta *Hoge Commissie* agar Van der Graaff bagaimanapun juga dilantik menjadi *directeur-generaal*. Diminta pula agar Frijkenius bersama Van der Graaff diangkat menjadi anggota sebuah komisi yang bertugas mengurus pertahanan kota Batavia. *Hoge Commissie* menerima kedua usul tersebut; hanya Nederburg memberi suara melawan. Alting dan Siberg merasa tertekan oleh revolusi yang telah berlangsung di negeri Belanda: peristiwa masuknya tentara Perancis, tumbangnya rezim lama, dan penegakan orde baru pada awal tahun 1795. Peristiwa tersebut mendapat sambutan yang baik di Batavia. Sekelompok warga kota mengirim surat permohonan untuk menuntut pengaruh lebih besar dalam pemerintahan. Nederburgh merasa tersinggung dan keluar dari sidang. Beberapa hari kemudian ia mengusulkan agar semua urusan penting dibahas dalam rapat bersama Pemerintah Agung dan *Hoge Commissie*.[16] Dengan demikian Nederburgh memperoleh dukungan politik yang cukup kuat. Mulai bulan Desember beliau mengetuai rapat-rapat gabungan. Dengan persetujuan mayoritas rapat ia mengeluarkan Van der Graaff dari komisi, dan mengangkat Siberg sebagai penggantinya.

Pada tanggal 17 Februari 1797 Alting melepaskan jabatannya sebagai gubernur jenderal dan anggota *Hoge Commissie*. Ia digantikan oleh Pieter Gerardus van Overstraten. Frijkenius meninggal dunia pada tanggal 6 Juni tahun itu, tetapi ia tidak diganti. Pada tanggal 10 Juli dan 10 November 1797 Nederburgh mengajukan permintaan pengunduran dirinya kepada *Comité tot de Zaken van de Oostindische Handel en Bezittingen* (Komite Urusan Perdagangan dan Jajahan di Hindia Timur). Tetapi permintaan ini baru dikabulkan pada tahun 1799, setelah *Hoge Commissie* dibubarkan dengan upacara khidmat (23 September 1799). Nederburgh pulang ke tanah air dan di sana akhirnya (17 November 1803) ia diberhentikan dengan hormat oleh *Raad der Aziatische Bezittingen* (Dewan Jajahan di Asia).

Dampak upaya *Hoge Commissie* sangat terbatas. Negeri Belanda diduduki oleh tentara Perancis, yang membawa pergolakan politis, dan sebagian besar kantor-kantor cabang VOC di Asia direbut oleh orang Inggris. Kendati demikian, dalam surat-surat komisi itu kepada *Heren Zeventien* tampak bahwa komisi bagaimanapun juga berhasil mengambil sejumlah keputusan dan memberlakukan beberapa pembaruan yang justru tidak berhasil dilakukan oleh Pemerintah Agung. Pada tanggal 14 Januari 1795 *Hoge Commissie* menulis kepada *Heren Zeventien* bahwa Pemerintah Agung menanggung beban kerja yang terlalu berat dan terpengaruh oleh kelompok lima orang yang berpandangan sempit. *Hoge Commissie* menulis sejumlah surat panjang lebar kepada *Heren Zeventien*. Indeks-indeks pada surat itu memperlihatkan betapa intensifnya campur tangan *Hoge Commissie* dengan berbagai badan dan urusan, umpamanya *Raad van Justitie* (Dewan Peradilan), *Amfioen Sociëteit* dan *Amfioen Directie*, *Bank Courant* dan *Bank van Lening* (lihat di bawah), masalah-masalah yang menyangkut masyarakat Batavia serta pemerintahan kota itu, pembaruan jawatan administrasi (antara lain pembukuan kegiatan dagang dan pembayaran gaji personel), penggalakan usaha orang swasta di bidang perdagangan di tengah kemeranaan kota Batavia, dan sejumlah besar urusan lain.[17]

3. *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan, 1808-1811)

Pada tanggal 19 Desember 1808 *Hoge Regering*, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal H.W. Daendels, mendirikan *Algemene Rekenkamer van Indië*. Pada waktu itu, Daendels sedang melaksanakan reorganisasi menyeluruh tata pemerintahan. Melalui badan baru tersebut, yang menggantikan *generale visite-kantoor* dan *kantoor-generaal*, Daendels ingin memperoleh gambaran lebih jelas mengenai pendapatan dan pengeluaran negara Hindia Belanda. *Algemene Rekenkamer*, yang terdiri atas seorang ketua, empat anggota, dan seorang panitera, diberi tugas mengawasi pendapatan dan pengeluaran semua badan pemerintahan di Hindia Belanda, termasuk di tingkat lokal.

Instruksi bagi *Algemene Rekenkamer* disusun oleh Daendels sendiri dan pada tanggal 19 Desember 1808 disahkan oleh *Hoge Regering*. Empat hari kemudian kantor *visitateur-generaal* dibubarkan dan pada hari itu juga gaji anggota-anggota dan pegawai *Rekenkamer* ditetapkan. Dua kali setahun (Juni dan Desember) badan tersebut harus mengirim laporan umum mengenai kegiatannya, disertai data finansial teperinci, kepada Pemerintah Agung. Sayangnya, laporan-laporan ini, yang menggantikan laporan *visitateur-generaal*, tidak berhasil ditemukan lagi. Bagaimanapun, administrasi keuangan kantor-kantor di pantai timurlaut Pulau Jawa (Semarang) dan di ujung timur (*Oosthoek*) pulau itu (Surabaya), diperiksa oleh *Algemene Rekenkamer*. Arsip lembaga ini sebaiknya disimak bersamaan dengan laporan-laporan keuangan dan administrasi *directeur-generaal*, yang adalah atasan *visitateur-generaal*.[18] Pada tahun 1811 *Algemene Rekenkamer* dibubarkan lagi.

4. *Raad van Justitie* (Dewan Peradilan, 1620-1809)

Raad van Justitie, yang berkedudukan di Batavia, merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di wilayah kekuasaan VOC. Badan ini didirikan pada tahun 1620 dengan nama *Ordinaris luijden van den Gerechte in 't fort ofte Casteel* (Petugas peradilan biasa di benteng). Dalam resolusi Pemerintah Agung bertanggal 10 September 1626 nama ini diubah menjadi *Ordinaris Raed van Justitie binnen het Casteel Batavia* (Dewan Peradilan Biasa dalam Benteng Batavia). Dalam dewan tersebut, tokoh yang menyandang gelar *advocaat-fiscaal van Indië* bertindak sebagai jaksa. *Raad van Justitie* menangani perkara-perkara yang melibatkan VOC atau pegawai-pegawainya dan di samping itu menjadi instansi naik banding bagi perkara-perkara perdata yang telah disidangkan dalam *College van Schepenen* (pengadilan bagi golongan swasta), dan (di kemudian hari) bagi perkara-perkara yang telah ditangani dalam pengadilan di luar Batavia. Akhirnya *Raad van Justitie* juga harus memutuskan perkara-perkara yang tidak sempat ditangani oleh pengadilan lainnya, dan merevisi keputusan-keputusan dalam perkara-perkara perdata yang telah disidangkannya sendiri. Revisi ini dilakukan oleh *adjuncten-adviseurs* (ajun-penasihat), yang setiap kali ditunjuk untuk menangani kasus tertentu. Jumlah perkara yang harus disidangkan makin lama makin besar. Oleh karena itu, perkara-perkara kecil diperiksa lebih dahulu (dan untuk sebagian juga diselesaikan) oleh beberapa orang yang disebut *Commissarissen uit den Raad van Justitie voor kleine zaken*.

Raad van Justitie di Batavia, yang sejak (paling tidak) tahun 1661 terdiri atas sembilan anggota, bersidang dalam *Kasteel*. Semua anggotanya adalah pegawai VOC. Ketuanya merangkap anggota *Raad van Indië*. Selama abad ke-17 anggota *Raad van Justitie* diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Agung. Dalam tahun 1620-an dan 1630-an acap kali mereka kurang ahli, dan tidak jarang memakai prosedur yang sewenang-wenang. Pengangkatan orang yang kurang ahli di bidang hukum, dan ketergantungan *Raad van Justitie* pada Pemerintah Agung dalam perkara-perkara pengadilan yang penting, ternyata menghalangi pelaksanaan peradilan yang teratur. Oleh karena itu, sejak tahun 1690 anggota *Raad van Justitie* diberhentikan (dan sejak 1697 juga diangkat) hanya oleh *Heren Zeventien*.[19] Untuk seterusnya yang diangkat ialah pakar-pakar hukum yang benar-benar ahli, sehingga *Raad* bertambah profesional. Meski tindakan tersebut membatasi wewenang *Hoge Regering*, pemerintah di Asia itu tetap berhak membaca berkas semua proses. Bilamana *Raad van Justitie* tidak lengkap, *Hoge Regering* berhak mengangkat seorang anggota luar biasa (walau untuk sementara waktu saja). Semua keputusan dan vonis *Raad van Justitie* harus berlaku dengan segera tanpa gangguan kendala apa pun. Gubernur jenderal dan anggota *Raad van Indië* dilarang mengampuni seorang penjahat, atau membatalkan vonis dan prosedur, atau menimbulkan kendala yang menghalangi jalannya prosedur itu. Hanya saja, mereka boleh memberi grasi kepada seorang yang dihukum mati. Oleh sebab itu, baik *Raad van Justitie* maupun *College van Schepenen* wajib mengirim berkas-berkas perkara orang yang dihukum mati kepada gubernur jenderal dan para anggota *Raad van Indië*. Setelah perkara itu ditinjau, mereka dapat mengesahkan hukumannya, atau mengubahnya sesuai dengan pandangan mereka atas perkara yang bersangkutan.[20]

Pada abad ke-17 dan ke-18 Pemerintah Agung sering mempengaruhi organisasi *Raad van Justitie*. Sebab, penagihan denda dan penyitaan harta pegawai VOC langsung menyangkut administrasi Kompeni. Pemerintah Agung (khususnya para gubernur jenderal) acap kali melakukan campur tangan informal dalam perkara hukum terhadap pegawai VOC yang telah melanggar larangan melakukan perdagangan swasta atau delik-delik lain yang kena hukuman denda, pemotongan gaji bulanan, atau penyitaan harta. Secara formal, *Hoge Regering* mengawasi pencantuman hukuman tersebut dalam *sententieboecken* (daftar vonis) dan pemberitahuan dendanya kepada *koopman* yang mengurus *soldijkantoor*. Karena para pejabat yang bertindak sebagai jaksa (*fiscaal*, *baljuw*, *landdrost*) berhak menerima sebagian denda itu, maka sekretaris *Raad van Justitie* wajib menyampaikan daftar hukuman dan penyitaan kepada mereka tiga atau empat bulan sekali. Pemerintah Agung berwenang juga menentukan pembagian denda yang dikenakan dan harta milik yang disita di antara dewan itu sendiri, jaksa, orang-orang miskin, kepala kas negara (*ontvanger*), dan kepala kantor yang menerima bea impor dan ekspor (*licentmeester*).[21]

Raad van Justitie di Batavia adalah satu-satunya badan yang berwenang dalam perkara-perkara yang melibatkan Kompeni atau pegawai-pegawainya di seluruh wilayah oktroi VOC. Tetapi di setiap *gouvernement* juga terdapat lembaga yang bernama *Raad van Justitie*, yang sering terdiri atas tokoh-tokoh pemerintahan setempat (yang biasanya bernama *Politieke Raad*). Fungsi rangkap ini sering berakibat terjadinya pencampuradukan kepentingan, dan sengketa. Perkara-perkara yang tidak sampai diselesaikan oleh *Raad van Justitie* sewilayah ini, khususnya perkara rumit yang prosedurnya kurang jelas, diteruskan ke Batavia. Dalam arsip masih tersimpan sebagian surat-menyurat *Raad van Justitie* di Batavia dengan *Politieke Raden* di sejumlah wilayah.

Di ANRI hanya terdapat sisa kecil arsip *Raad van Justitie* di Batavia. Sebaliknya, surat-surat *Raad* kepada *Heren Zeventien* dan direksi *Kamer* Zeeland luar biasa banyaknya. Surat-surat ini disimpan dalam Nationaal Archief di Den Haag. Di sini terdapat antara lain salinan daftar perkara (*rollen*) perdata dan pidana dan hukuman-hukuman yang telah dikenakan dalam perkara pidana, semuanya mulai dari tahun 1637.[22]

Sebagaimana telah dikatakan di atas, semua perkara yang melibatkan pegawai Kompeni, baik yang perdata maupun yang pidana, wajib ditangani oleh *Raad van Justitie* di Batavia. Begitu juga halnya perkara-perkara yang melibatkan seorang *burger* (warga Eropa bukan pegawai Kompeni) atau seorang Asia ('asing') dan seorang pegawai Kompeni. Orang Asia yang bersengketa dengan sesamanya orang Asia dapat memilih antara *Raad van Justitie* dan *Schepenbank*. Informasi mengenai kewenangan *Raad van Justitie* di bidang-bidang lain dapat dicari dalam *Bataviase Statuten* tahun 1642. *Statuten* tersebut merupakan kompilasi plakat dan undang-undang yang telah diberlakukan dalam kedua dasawarsa pertama kota Batavia dan yang dapat dipandang sebagai dasar hukum dan pengadilan dalam wilayah VOC.[23]

Mulai tahun 1798 *Raad van Justitie* menamakan diri *Hoge Raad* (Dewan/Mahkamah Agung). Tetapi pada tanggal 15 Agustus 1809 Daendels membubarkan *Hoge Raad* itu dan menggantikannya dengan *Hoge Raad van Justitie van Hollandsch Indië*. Bagi badan baru ini disusun instruksi sebesar 47 pasal, yang diharapkan akan menghilangkan cacat yang melekat pada sistem peradilan yang lama, seperti pemberian jabatan atau tempat kerja kepada sanak saudara dan penerimaan uang pelicin.[24]

III. Lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia

1. *College van Schepenen* (*Schepenbank*, 1620-1809)

Lembaga-lembaga pemerintahan kota Batavia tidak dapat dianggap sebagai lembaga mandiri, sebab tunduk pada *Hoge Regering* dan dengan demikian pada VOC. Yang paling penting ialah *College van Schepenen* (juga disebut *Schepencollege*, *Schepenbank*, atau *Magistraat*). Pada tanggal 24 Juni 1620 dua pegawai Kompeni dan tiga warga swasta diangkat menjadi anggota *Schepencollege* yang pertama, sedangkan Kapitan Orang Cina (kepala orang-orang Cina) menjadi anggota luar biasa. Pada tahun 1625 keluarlah instruksi mereka, yang menentukan bahwa lembaga tersebut harus menangani semua perkara perdata dan pidana yang melibatkan warga bebas kota Batavia dan orang-orang asing.[25] Mulai tahun 1627 anggotanya berjumlah tujuh orang, ditambah dua orang Cina.[26] Istilah 'orang asing' dalam instruksi tersebut di atas mengacu ke orang-orang Asia di Batavia. Maka dapat diduga bahwa arsip *Schepencollege* merupakan salah sumber terpenting mengenai warga Batavia yang berkebangsaan Asia.

Biasanya rapat-rapat *Schepencollege* diketuai oleh seorang anggota Pemerintah Agung. Sampai tahun 1690 dua atau tiga anggotanya (yang disebut *schepenen*) adalah pegawai Kompeni, sedangkan tiga atau empat orang berasal dari golongan warga

bebas (swasta) atau *burger*. Setiap tahun mereka dipilih oleh Pemerintah Agung. Menjelang tanggal 30 Mei (hari ulang tahun direbutnya kota Jakatra, yang dirayakan setiap tahun dengan dentuman meriam) *college* menyampaikan daftar nama anggota yang sedang menjabat kepada gubernur jenderal. Selain itu, mereka mencalonkan anggota-anggota baru. *Hoge Regering* lebih dahulu mengisi jabatan ketua dengan jalan menunjuk salah seorang anggota *Raad van Indië*, lalu memilih sejumlah anggota baru. Masing-masing dipilih dari antara dua calon. Menjelang akhir abad ke-17 daftar calon mencakup delapan orang warga swasta (Eropa), enam pegawai Kompeni, dan empat orang Cina. Darinya *Hoge Regering* memilih (dengan suara mayoritas) empat warga bebas, tiga pegawai Kompeni, dan dua orang Cina. Mulai 1690 jumlahnya berubah menjadi lima orang *burger* dan empat pegawai Kompeni. Acap kali anggota yang sudah menjabat dipilih kembali. Presiden/ketua *Schepencollege* senantiasa seorang pegawai Kompeni, yaitu seorang anggota biasa atau luar biasa *Raad van Indië*. Dialah yang menyimpan dan menggunakan segel kota yang dibubuhkan pada akta, surat dan sebagainya. Untuk tiap kali membubuhkan segel itu diterimanya imbalan sebesar satu *reaal van achten*.

Sesudah pengangkatan *Schepenbank* baru, pada tanggal 30 Mei anggota-anggota lama disambut dalam ruang gubernuran. Di sana orang mengucapkan terima kasih atas jasa mereka di masa lalu, kemudian masuklah anggota baru. Anggota lama yang masih menjabat terus, mengucapkan *eed van purge* (sumpah pembersihan atau kebersihan), sedangkan yang baru mengucapkan *eed voor schepenen* (sumpah bagi kaum *schepen*).

Biaya yang dikeluarkan oleh *College van Schepenen* ditutup oleh Pemerintah Agung. *College* itu pun tidak berwenang di bidang pendapatan kota Batavia, sebab pendapatan yang diperoleh dari penyewaan pasar tekstil, pasar sayur dan ikan, dan sebagainya, serta hasil pajak perorangan orang Cina disetor langsung ke dalam kas VOC. Anggota *College* mendapat gaji sebesar 100 *realen* setiap enam bulan. Di atas itu, anggotanya yang adalah pegawai Kompeni mendapat uang bulanan sebanyak 13 *realen*, sedangkan semua anggota menerima 50 *realen* 'uang jubah' (*mantelgeld*) untuk membeli jubah jabatan resmi, yang harus mereka kenakan waktu bersidang dalam Gedung Balai Kota.

College van Schepenen bertanggung jawab atas pemilihan anggota semua lembaga kota lainnya. Beberapa hari sesudah tanggal 30 Mei *college* yang baru menyampaikan daftar calon untuk lembaga-lembaga itu kepada Pemerintah Agung. Lalu pemerintah menunjuk anggota *colleges* yang baru dengan jalan memilih satu dari antara dua calon, yaitu tujuh *weesmeesters* (Wali Yatim Piatu), yang diketuai oleh seorang anggota *Raad van Indië*, lima komisaris untuk perkara perkawinan dan perkara kecil, empat *boedelmeesters*, yaitu pengelola harta peninggalan orang Cina dan 'orang asing' atau 'bukan Kristen' (Asia) lainnya (dua di antaranya orang Belanda, dua orang Cina, dan pada abad ke-18 juga dua orang Islam). Di samping itu, dua *buitenregenten* (pengurus luar) penjara wanita (*vrouwentuchthuis*), dan dua orang *buitenregenten* Panti Kusta (*lazarushuis*).

Setelah Pemerintah Agung dalam sidangnya itu mengesahkan pengangkatan mereka semua, para anggota semua *college* tersebut yang mundur disambut dalam ruang gubernur Kasteel Batavia dan diucapkan terima kasih atas jasa mereka. Sesudah itu anggota baru dihantar masuk dan diminta mengucapkan sumpah setia (dengan perkecualian *regent*/pengurus Wisma Yatim Piatu dan Panti Kusta).[27]

Selain hak mengajukan calon-calon anggota *colleges* lainnya, *College van Schepenen* memiliki juga hak untuk setiap tahun, dalam bulan Juni, mencalonkan perwira-perwira baru kompi-kompi atau barisan pertahanan sipil (*schutterscompagnieën*) dari antara warga kota. Akan tetapi, para perwira kompi-kompi di Kasteel, di kawasan tukang-tukang, dan di galangan pelengkapan kapal ditunjuk langsung oleh Pemerintah Agung.

Kekuasaan ketua *Schepenbank* itu besar sekali. Ia mewakili *Raad van Indië* yang berwibawa besar itu; ia berwenang mengumpulkan *college* dan bila dalam pemberian suara yang pro dan kontra sama banyaknya, ia boleh memberi suara ganda. Pada hari Selasa ia memeriksa buku-buku, dan mengetuai rapat-rapat biasa, yang diadakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 11 pagi.

Rapat-rapat ini diadakan dalam *schepenkamer* Gedung Balai Kota (kini Musium Fatahilah). Ketua dan sekretaris (seorang pakar hukum) wajib selalu hadir lebih dini. Mereka mempersiapkan rapat dan mengawasi laporan-laporan serta notula dalam buku-buku resolusi. Di samping itu, mereka menyusun daftar-daftar perkara (*rol*) perdata dan pidana. Pada abad ke-18 *Schepencollege* makin menaruh perhatian pada pekerjaan umum (infrastruktur dan jembatan-jembatan) serta pelbagai urusan kota, antara lain pengawasan mata ukuran dan timbangan, tempat penjualan daging, pasar ikan dan sayur, tempat-tempat menyimpan perahu-perahu, tempat pengeringan ikan, pekapuran, alat pemadam kebakaran, izin membuka warung roti, petugas penguji roti dan daging, bidan-bidan kota, pembuatan uang

palsu, pengawasan warung-warung dan penyewa kendaraan, upacara perkawinan dan pemakaman, perwira *schutterij*, *burgerwachten* (semacam hansip), penjara kota, tenaga medis (*chirurgijns* dan *practizijns*), *toptafels* (meja judi orang Cina), halaman dan rumah warga kota, losmen, pemasungan orang sakit jiwa, panti kusta, lotere kota. Setelah berlangsung pemilihan tahunan *wijkmeesters* (semacam kepala RW) baru, para anggota *Schepenbank* menghabiskan banyak waktu dengan mengumpulkan dana dari kaum warga untuk membiayai pengerukan kanal-kanal dan parit-parit di kota Batavia. Taman-taman hijau di kota itu diurus oleh petugas yang bernama *rooimeesters*.

Tugas kepolisian diemban oleh fungsionaris yang menyandang gelar *baljuw*, yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah Agung. Wilayah kekuasaannya mencakup baik kota maupun daerah di sekitarnya. Ia berwenang menahan orang, mengenakan denda, menyeret orang ke depan pengadilan, dan mengajukan perkara hukum terhadap mereka. Ia berwenang menahan orang bilamana mereka ribut, berkelahi, mencuri, atau melakukan pelacuran, zina, perkosaan, pembunuhan berencana atau tidak disengaja. Ia harus mengawasi pula kebersihan jalan-jalan umum, pengangkutan sampah, dan ketertiban umum.[28] Sesudah tahun 1651 wilayah kekuasaannya hanya mencakup kawasan kota, *Zuidervoorstad* (kota satelit selatan, yaitu Glodok), dan parit-parit yang mengelilingi kota, sebab mulai tahun itu, daerah sekitar Batavia (*Ommelanden*) diawasi oleh seorang *landdrost*. Baik *baljuw* maupun *landdrost* (di kemudian hari ada dua petugas yang menyandang gelar itu, satu untuk daerah di sebelah timur Batavia dan satu untuk daerah di sebelah barat) dibantu oleh orang *kaffer* (negro).[29] Sejak tahun 1681, jumlah mereka ini 22, yaitu 8 untuk *baljuw*, 8 untuk *landdrost* di sebelah barat, dan 6 untuk yang di sebelah timur.

Baljuw dan *drosten* didampingi oleh *wijkmeesters* (semacam kepala RW), yang ikut bertanggung jawab atas ketertiban, pemadaman api, dan pendaftaran penghuni wilayah mereka. Setiap tahun *wijkmeesters* ini harus menyampaikan daftar penduduk wilayah mereka kepada *College van Schepenen*, yang selanjutnya mempersiapkan daftar menyeluruh penduduk kota dan meneruskannya kepada Pemerintah Agung.

College van Schepenen mempunyai peluang cukup besar untuk bertindak, khususnya dalam perkara-perkara perdata. Sekitar tahun 1630 *college* tersebut sudah menyelesaikan sekitar 250 perkara setiap tahun. Pada masa itu perkara-perkara itu terutama menyangkut orang Belanda, umpamanya masalah hutang yang tidak mau dibayar. Pertikaian suami-istri, perbuatan zina, penghinaan, larinya budak laki-laki dan perempuan, minum candu secara berlebihan, dan judi sering muncul dalam daftar-daftar perkara perdata. Di antara perkara pidana menonjollah kasus pembunuhan tidak dengan sengaja, pemakaian kekerasan, larinya budak, dan pencurian. Untuk vonis atas orang yang telah melakukan kejahatan berat harus diminta *approbatie* (persetujuan) Pemerintah Agung. Buku-buku resolusi *Hoge Regering* menyebut sejumlah besar proses pidana, khususnya pada abad ke-17. Maka sebaiknya, di samping *criminele rollen van schepenen* orang menyimak pula buku-buku resolusi tersebut.

Pemerintah Agung harus pula mengesahkan semua hukuman mati. Hukuman itu dapat dihapuskan melalui pemberian grasi. Berlakulah kebiasaan bahwa pada saat pelantikan seorang gubernur jenderal yang baru pemerintah membebaskan sejumlah tahanan yang diikat dengan rantai, tanpa meminta pendapat para anggota *Schepenbank*. Dengan cara itu sel-sel penjara di bawah Gedung Balai Kota (*stadsboeien*) dikosongkan. Saat Gubernur Jenderal Cornelis Speelman dilantik (1681) sebanyak 30 orang rantaian (orang hukuman yang harus melakukan kerja paksa dengan dirantai) berkebangsaan Eropa dibebaskan, sedangkan empat wanita Eropa dan empat wanita Asia dilepaskan dari penjara wanita. Lima orang, di antaranya seorang imam bernama Coeningh, dibebaskan dari pembuangan ke Tanjung Harapan.[30]

Selama tahun 1650-an dan 1660-an, *Schepencollege* kota Batavia semakin sibuk menangani pelanggaran dan perkara hukum yang ringan. Perkara seperti itu biasanya diselesaikan oleh dua orang *schepen* yang dikuasakan untuk itu (*gecommitteerden*) bersama dengan seorang komisaris urusan-urusan perkawinan. Pada 1673 Pemerintah Agung memutuskan untuk mengurangi beban pengadilan dengan menyerahkan semua perkara ringan kepada para komisaris urusan-urusan perkawinan; dengan maksud itu jumlah mereka ditambah dengan mengangkat satu orang komisaris lagi.[31]

Pada tahun 1679, atas permintaan *Schepenbank*, Pemerintah Agung memutuskan untuk meningkatkan jumlah anggotanya dari tujuh menjadi sembilan, 'demi kesejahteraan dan kepemerintahan kota ini dan daerah sekitarnya'.[32] Perluasan itu perlu karena pengawasan penduduk *Ommelanden*, khususnya pengawasan penggalian parit lingkar yang baru, menuntut tenaga lebih banyak. Akan tetapi, tidak lama kemudian *Schepencollege* tidak mau berurusan dengan pekerjaan tersebut, maka didirikanlah *college* baru, yaitu *College van Heemraden*. Tentu saja, dalam tahun berikutnya jumlah anggota *Schepencollege* diturunkan lagi menjadi tujuh orang.[33]

College van Schepenen mengemban juga tugas lain yang penting, yaitu registrasi serah terima harta tidak bergerak dan budak-budak. Di Batavia berlaku larangan menyerahterimakan harta tidak bergerak tanpa surat bukti dari *Schepenbank*. Kendati demikian, sekali-sekali harta tidak bergerak diserahterimakan melalui akta notaris. Dengan cara itu orang menghindari pembayaran pajak penyerahan barang yang sebesar sepuluh persen. Siasat ini dipakai juga dalam hal jual-beli budak-budak, yang juga sering melibatkan seorang notaris. Masih perlu dilakukan banyak penelitian, baru kita akan mengenal mana yang diperbolehkan dan mana tidak, pendeknya apa yang merupakan praktik sehari-hari. Pada tanggal 13 Maret 1809 *College van Schepenen* menerima instruksi baru dari Gubernur Jenderal H.W. Daendels.[34]

2. *College van Weesmeesters* atau *Weeskamer* (Dewan Pengurus/Balai Yatim Piatu, 1624-1885)

Pada tanggal 1 Oktober 1624 *Hoge Regering* melantik empat orang pengurus yatim piatu merangkap kurator dengan tugas menangani harta peninggalan pegawai Kompeni dan orang swasta yang telah meninggal.[35] Dengan demikian berdirilah *College van Weesmeesters* atau *Weeskamer* yang pertama. Pada tahun berikutnya (tanggal 16 Juni 1625) diberlakukan instruksi atau peraturan berisikan 49 pasal.[36] Mula-mula dewan ini beranggotakan tiga sampai empat orang, di antaranya beberapa orang swasta (*burger*). Setiap tahun, sesudah pemilihan *Schepencollege*, dewan tersebut mengajukan daftar calon *weesmeester*, lalu Pemerintah Agung memilih lima orang yang mampu menangani perkara-perkara semacam ini, di antaranya dua pegawai Kompeni dan tiga orang swasta. Pada tanggal 6 Juni 1670 jumlah anggota *Weeskamer* diperluas menjadi tujuh orang, yaitu ketua (yang harus seorang anggota biasa atau anggota luar biasa *Raad van Indië*), dua pegawai Kompeni, dan empat orang swasta.[37]

College van Weesmeesters bertugas mengurus kepentingan anak yatim dan yatim piatu selama mereka belum akil balig, serta mengelola harta peninggalan tidak terurus orang-orang Eropa.[38] Di daerah tropis, banyak orang Eropa yang meninggal pada usia relatif muda, lalu pihak yang ditinggal mati kawin lagi. *Weeskamer* menjaga agar anak yang lahir dari perkawinan sebelumnya tidak kehilangan bagian mereka yang sah dari modal yang telah terkumpul selama perkawinan itu. Badan tersebut mengawasi modal itu sampai anak yang bersangkutan menikah atau mencapai umur akil balig.

Bila ada yang meninggal dunia, sebelum orang itu dimakamkan penggali kubur harus memberitahukan kepada *Weesmeesters* (atau kepada sekretaris Balai Yatim Piatu) nama orang yang telah meninggal dan apakah ada surat wasiat. Selanjutnya sekretaris mencatat nama orang itu dalam daftar nama. Untuk pemberitahuan dan pendaftarannya, penggali kubur dan sekretaris masing-masing mendapat enam *stuiver* (kelip, 5 sen) Sesudah itu, seorang *bode* (petugas) disuruh memanggil janda atau duda ke Balai Yatim Piatu. Ayah atau ibu yang masih hidup itu wajib menyediakan informasi mengenai modalnya dalam jangka waktu enam minggu, sehingga jumlah modal itu dapat dicatat dalam buku yatim piatu. Modal tersebut dikelola oleh Balai Yatim Piatu hingga anaknya dewasa.[39]

Jika baik ayah maupun ibu telah meninggal, anggota keluarga yang terdekat atau tetangga harus datang ke Balai Kota, lalu harta warisan dilelang oleh *stadsvendumeester* (pegawai yang bertugas memimpin lelang): perabot rumah tangga, pakaian, permata, budak, dan seterusnya (lihat arsip *vendumeester*). Hasilnya menjadi milik anak-anak yang ditinggal mati. Biasanya Balai Yatim Piatu meminjamkan uangnya kepada Kompeni dengan bunga tetap. Kemudian balai itu mengawasi penampungan, pakaian, dan pendidikan anak-anak yang bersangkutan.

Di kota yang letaknya jauh dari tanah air, seperti Batavia, sering tidak mungkin menemukan orang yang berhak menerima warisan orang yang telah meninggal itu. Warisan orang seperti itu tetap dikelola oleh *Weeskamer*. Bilamana ada yatim (piatu) yang sudah akil balig maka *Weeskamer* membayarkan uangnya hanya kalau dapat dipastikan bahwa mereka tinggal di wilayah VOC, di Batavia, Malaka, Banda, Colombo, dan seterusnya. Dalam hal itu *Weeskamer* tetap mengelola modal yang ditinggalkan, hingga tempat tinggal dan status ahli waris jelas. Jika tidak tercapai kepastian, modal itu disebut milik *onbekende wezen* (yatim piatu tidak dikenal). Kasus seperti ini sering terjadi, maka modal yang langsung dikelola oleh *Weeskamer* makin lama makin besar. Pada 1692 modalnya sudah sebesar 1.594.459 ringgit, di antaranya 76.891,38 dalam akun *onbekende wezen*.[40]

Pada akhir abad ke-17, dalam surat wasiat orang makin sering mengecualikan *Weeskamer* dari pengelolaan harta peninggalan. Kendati demikian, bagi orang-orang Eropa yang tinggal di seberang laut *Weeskamer* itu merupakan fasilitas yang amat penting. Adanya *Weeskamer* menjamin bahwa ketentuan dalam surat-surat wasiat dan warisan-warisan benar-benar terlaksana. Sama seperti lembaga-lembaga lain, seperti *Raad van*

Justitie dan majelis gereja, Balai Yatim Piatu di Batavia berfungsi sebagai instansi yang mengurus kepentingan yatim (piatu) yang masih di bawah umur. *Weeskamer* melakukan korespondensi dengan balai-balai serupa di negeri Belanda, khususnya di kota-kota VOC, yaitu Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Middelburg, Vlissingen, Rotterdam, Dordrecht, dan Delft. Di samping itu, dalam administrasinya muncul juga beberapa kota lain, seperti Utrecht, Arnhem, Zutphen, dan lain-lain.

Weeskamer di Batavia merupakan lembaga yang penting untuk seluruh wilayah yang tercakup oleh oktroi VOC. Pengurus yatim piatu di Sri Lanka (Colomba, Galle, Jaffnapatnam) dan di daratan India (Cochin di pantai Malabar, Houghly di Benggala, dan Nagapatnam di pantai Koromandel) tetap melakukan surat-menyurat dengannya. Umpamanya, mereka mengirim ke sana salinan administrasi keuangan mereka. Data-data mengenai harta peninggalan orang-orang Eropa yang telah meninggal di pusat-pusat VOC lainnya dicatat di Batavia dalam yang disebut *Malakse weesboeken* (pembukuan yatim piatu dari Malaka), *Ambonse weesboeken*, dan seterusnya.

Hingga kini, jarang sekali orang melakukan penelitian dalam arsip *Weeskamer*. Namun, dalam arsip ini terdapat informasi berlimpah-limpah mengenai nama keluarga, warisan, dan harta milik golongan Eropa. Maka arsip terbut merupakan sumber penting bagi para pakar genealogi, termasuk untuk abad ke-19. Pada masa Daendels, di sejumlah kota *weeskamer* dan *boedelkamer* (balai harta peninggalan orang Asia, lihat di bawah) digabungkan (1808), tetapi yang di Batavia tetap terpisah. Setelah pemerintahan Belanda ditegakkan kembali, dengan keputusan bertanggal 23 Oktober 1818 diberlakukan instruksi baru bagi *Weeskamer*. Prosedur lama, yang tercantum dalam *Bataviase Statuten* tahun 1642 (dibaharui tahun 1766), untuk sebagian besar tetap berlaku. Pada tahun 1828 dibuat instruksi baru lagi. Akhirnya perlu diketahui bahwa *College van Weesmeesters* en *College van Boedelmeesters* di Batavia tetap berdiri secara terpisah; baru pada tahun 1885 keduanya digabungkan.[41]

3. *College van Heemraden* (1664-1809)

Pada tanggal 19 September 1664 dibentuk *College van Heemraden*, 'dengan cara yang lazim di tanah air'. *Raad van Indië* sudah lama menyatakan bahwa *landdrost*, yang bertugas mengawasi keamanan dan ketertiban di daerah sekitar kota Batavia (*Ommelanden*) dan tanah partikelir (tanah milik orang swasta), harus menanggung beban kerja yang terlampau berat. Maklumlah para pemilik tanah sering bersengketa, sedangkan persil-persil tanah dan pekarangan terpencar, sehingga sulit untuk mengawasinya dan mendaftarkannya dengan teliti. Selain *landdrost*, dalam *college* yang baru itu duduk tiga anggota *Hoge Regering*, yaitu Pieter Anthonisz Overtwater, Pieter van Hoorn, dan Joan Thuysz. Salah seorang dari mereka, yaitu Thuysz, mengenal daerah sekitar Batavia dengan baik, sebab ia adalah pengawas istal-istal Kompeni.[42]

Tidak diketahui dengan tepat mana tugas-tugas yang dipercayakan kepada *College van Heemraden*. Yang pasti, pada 1672 *college* itu masih ada, sebab pada tahun itu Pemerintah Agung memutuskan untuk memperluasnya dengan tiga anggota lagi. Salah seorang di antaranya ialah Letnan Frederick Müller. Dia adalah seorang penjaga ketertiban yang berpengalaman, namun kasar, yang mahir berbahasa Jawa. Pada kesempatan ini diangkat pula seorang wakil-*landdrost* dan jumlah pembantu pejabat itu ditingkatkan dari enam menjadi sepuluh.[43] Agaknya mereka terutama bertugas menjaga ketertiban di wilayah *Ommelanden*, sedangkan pengawasan pekerjaan umum tetap dipercayakan kepada *College van Schepenen*.

Dugaan ini dikuatkan oleh kejadian pada tahun 1679. Waktu itu *schepenen* menyatakan tidak bersedia lagi mengawasi penggalian parit lingkar yang baru. Sesudah diskusi panjang lebar (yang isinya tidak kita kenal), Pemerintah Agung memutuskan untuk menunjuk komisi tersendiri, yang akan terdiri dari pegawai Kompeni dan orang-orang swasta dan yang akan bertugas mengawasi pekerjaan umum tersebut di atas dan pekerjaan umum yang lain. Dirk Blom, seorang anggota biasa *Raad van Indië*, diangkat menjadi ketua; seorang *koopman* dan tiga orang swasta menjadi anggota biasa. *College* baru ini diberi nama 'President en Heemraden van Batavia's Ommelanden', tetapi untuk sementara waktu tugasnya hanya mengawasi penggalian parit lingkar.[44]

Pada tanggal 21 Mei 1680 anggota *Raad van Indië* yang menjabat ketua *Schepenbank* dan *College van Heemraden*, yaitu Anthonio Hurdt dan Dirck Blom, diminta merancangkan anggaran dasar bagi *Heemraden*, yang akan mengatur tugas 'mengawasi tanah negara, dan menggalakkan kesejahteraan serta penghasilannya [...] dan menentukan sampai seberapa jauh *College van Schepenen* dan *College van Heemraden* dapat dan boleh mengambil tindakan dan keputusan di bidang tersebut'. Pada tanggal 23 Juli rancangannya dibicarakan dan disetujui dalam rapat, dan lima hari kemudian instruksi itu diumumkan lewat plakat, lalu ditampung dalam *Bataviase Statuten*.[45]

Anggota pertama *College van Heemraden* diangkat dan disumpah oleh Pemerintah Agung,[46] tetapi

diputuskan bahwa untuk seterusnya *college* itu dapat mencalonkan sendiri anggota-anggota baru dan tidak akan tunduk pada aturan yang berlaku bagi semua lembaga pemerintahan lainnya di kota Batavia, yang tiap-tiap tahun diperbaharui melalui nominasi dan pemilihan anggota baru. Lagi pula, *college* tersebut mendapat seorang sekretaris tetap dan seorang pesuruh.[47] Berkat pengadaan *College van Heemraden*, pemerintah dapat dengan mudah mengawasi tanah, pemberian tanah kepada pihak ketiga, dan penggalakan prasarana di kawasan *Ommelanden*. Sebab ketuanya merangkap anggota *Raad van Indië*, lewat tokoh ini pemerintah dapat berkomunikasi secara langsung berkenaan dengan pelbagai urusan yang menyangkut *Ommelanden* itu.

Pada tanggal 23 Maret 1685 Pemerintah Agung memutuskan untuk meningkatkan jumlah anggota *College van Heemraden* menjadi sembilan orang. Salah satu dari kedua anggota baru ialah Adriaan de Man, yang berpangkat *opperkoopman* dan pengawas (kepala bagian) pekerjaan umum. Selaku *heemraad* ia mendapat tugas khusus mengawasi jembatan-jembatan, yang memang memerlukan reparasi secara teratur. Pada tahun itu (1685) Joan van Hoorn, seorang anggota luar biasa *Raad van Indië*, menjabat sebagai ketua, sedangkan Vincent van Moock, *landdrost*, menjadi wakil ketua. Kapten-kapten yang menjadi komandan benteng-benteng luar di sebelah barat dan timur kota Batavia pun termasuk anggota *College van Heemraden*.[48] Waktu *college* bersidang, pegawai kompeni dan orang swasta mengitari meja berselang-seling.[49]

Acap kali para anggota Pemerintah Agung begitu terdesak waktu, sehingga mereka tidak dapat menjabat sebagai ketua *College van Heemraden*. Oleh sebab itu, jabatan tersebut sering dipercayakan kepada mantan gubernur salah satu wilayah luar.[50] Jabatan wakil ketua dipegang oleh *landdrost*. Kesembilan anggota *college* membagi-bagikan tugas sebagai berikut: dua anggota menjadi *opperwijkmeester* di kawasan di sebelah barat kota, dua di sebelah timur, dan dua lagi di sebelah selatan. Ketiga kawasan tersebut terbagi atas 33 wilayah. Satu anggota bertugas menerima sepersepuluh ikat padi pada waktu panen padi di *onuitgegeven landerijen*, artinya di tanah yang tidak diberikan kepada pihak swasta, tanah milik Kompeni. Satu anggota lain menjadi *gecommitteerde tot de zaken der Inlanders*, artinya harus secara khusus memperhatikan urusan orang Bumiputera. Pada mulanya pejabat ini terutama bertugas membendung imigrasi liar orang Jawa ke daerah *Ommelanden*.[51]

Biasanya pemilihan *College van Heemraden* yang baru disusul pembagian baru para kepala RW (*wijkmeesters*). Tiap-tiap tahun *wijkmeesters* wilayah 'Oosterveld' (timur), dan seminggu kemudian teman-teman sejabatan mereka dari 'Westerveld' (barat) disuruh datang ke ruang sidang *heemraden*. Undangan dikirim satu minggu sebelumnya. Sebagai ganti *wijkmeester* yang telah meninggal atau berpindah ke alamat lain dilantik kepala RW yang baru berdasarkan daftar nama yang disusun oleh para *wijkmeester* sendiri. Setelah para calon diuji dan dibicarakan, *college* melakukan pemilihan dari daftar tersebut. Selanjutnya Pemerintah Agung harus menyetujui pemilihan itu.[52]

Bersama dengan para *wijkmeester*, *College van Heemraden* bertanggung jawab atas catatan sipil di wilayah *Ommelanden*. Setiap tahun dalam bulan Desember pesuruh memperingatkan para *wijkmeester* dan *buurtmeester* (semacam kepala RT) pada kewajiban mereka menyerahkan *wijkrollen* (registrasi penghuni wilayah, yang tercantum dalam *wijkboeken*). Pada 1706 diputuskan bahwa untuk selanjutnya *wijkboeken* akan dimasukkan dalam bulan Agustus, karena pada musim hujan lebih sulit menyusun daftar penduduk yang teliti.[53] Tetapi, sesudahnya pun para kepala RW sering menyerahkan daftar-daftar yang tak karuan. *Heemraden* bertugas menggabungkan daftar-daftar yang mereka terima menjadi *generale wijkrol van de Ommelanden* (daftar umum penduduk daerah di sekitar Batavia), yang bersama dengan *generale wijkrol* kota sendiri (yang disusun oleh *College van Schepenen*) setiap tahun dikirim ke negeri Belanda.

Pekerjaan administratif *College van Heemraden* dilakukan oleh seorang sekretaris. *College* tersebut memiliki seorang sekretaris, seorang pesuruh dan satu atau beberapa *landmeters* dan *onderlandmeters* (pengukur tanah tingkat I dan II), yang mengukur dan memetakan tanah. Di kantor dipekerjakan dua juru tulis. Tiap kali diangkat seorang sekretaris baru, ia menerima semua berkas arsip dan dokumen-dokumen, bersama indeksnya. Di samping itu ia menyimpan dan merawat peta-peta lama dan baru. Dalam *rolle van de padie* (daftar padi) ia mencatat jumlah ikat padi yang telah diserahkan dan dibawa ke gudang milik Kompeni oleh para petani yang menggarap tanah Kompeni. Mungkin sekali sekretaris juga menyimpan administrasi dari masa sebelum tahun 1664, di antaranya surat-surat warisan dari kurun waktu 1634-1639 dan buku surat warisan dari tahun 1661-1697.[54]

College van Heemraden berkantor di sebuah rumah di luar tembok kota, di sebelah timur kota. Di pekarangannya ada taman yang indah dan kebun buah-buahan. Di kebun itu para diaken gereja setiap tahun mengadakan pesta mangga bagi anak-anak yatim piatu. Kedua *landdrost* wajib menghadiri rapat *College* tersebut. Orang yang melanggar ketentuan-ketentuan di plakat

pemerintah, umpamanya tentang kebersihan jalan-jalan umum dan perawatan jembatan, atau yang menutup bendungan air tanpa izin dari yang berwajib, dapat saja dipanggil menghadap di kantor. Pelanggar seperti itu disebut *assurante ingelanden*. Para *heemraden* berwenang menagih denda, tetapi mereka tidak boleh mengenakan hukuman badan.

College van Heemraden mengawasi pemberian izin mendayagunakan penggilingan tebu, pabrik batu bata dan genting, serta pekapuran. Di samping itu, badan tersebut harus mengawasi tanah dan hutan-hutan milik Kompeni (biasanya Kompeni menuntut sepuluh persen hasil panen padi). Di hutan, mereka mengawasi kelestariannya, izin menebang kayu, dan pencurian kayu untuk kayu bakar. Sebagian tanah Kompeni dan sejumlah kolam ikan disewakan. Penghuni sejumlah kampung yang berdiri di tanah milik Kompeni harus juga membayar sewa tanah. *College* bertanggung jawab juga atas penagihan pajak kendaraan. Dalam buku-buku resolusi *College van Heemraden* terdapat daftar-daftar pemilik kendaraan.

Arsip *College van Heemraden* tidak seberapa besar, namun merupakan sumber terpenting untuk penelitian sejarah *Ommelanden* kota Batavia. Di dalamnya terdapat data-data mengenai perkembangan ekonomi pedesaan, perairan, golongan 'Indonesia' (berbagai kelompok yang kemudian berbaur menjadi golongan orang Betawi), orang Cina, pembukaan dan pemilikan tanah, serta nama-nama lama berbagai tempat.

Dalam rangka reorganisasi pemerintahan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Daendels mau membubarkan juga *College van Heemraden*. Maka pada tanggal 7 Februari 1809 badan itu dihapuskan. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas jasa mereka, lalu mereka dibebastugaskan. Tugas mereka diambil alih oleh *College van Schepenen*.[55] Perkara-perkara perdata dan urusan/sengketa kekeluargaan di daerah kekuasaan *landdrost* harus diselesaikan oleh seorang petugas yang menyandang gelar *Gecommitteerde tot en over de Zaken van den Inlander* (Wakil untuk Urusan-urusan orang Bumiputera). Pembagian administratif *Ommelanden* juga ditinjau ulang. Untuk seterusnya wilayah itu terdiri atas empat *schoutambten* (wilayah kekuasaan seorang *schout* = kepala polisi), yang masing-masing mempunyai seorang *schout* dan beberapa *onderschouten* (wakil *schout*), yang diberi rumah dinas di daerahnya sendiri.[56] Jumlah komandan bumiputera, yang sebelumnya tiga belas, dikurangi menjadi tujuh orang.[57]

4. *College (van Commisarissen) van Huwelijks en Kleine Gerechtszaken* (Dewan (Komisaris) Urusan-urusan Perkawinan dan Perkara Pengadilan yang Ringan, 1656-1812)

Pada tahun 1632 Pemerintah Agung menentukan bahwa untuk seterusnya para anggota *College van Schepenen* akan merangkap komisaris urusan-urusan perkawinan. Akibatnya, dalam bagian lama arsip *Schepenbank* terdapat juga sejumlah akta perkawinan, yang dibuat oleh seorang *schepen* yang juga bertindak sebagai komisaris. Mulai tanggal 1 Juni 1641 para Komisaris urusan-urusan perkawinan mendapat kantor sendiri dengan ketua (presiden) sendiri, sama seperti teman-teman sejabatan mereka di kota Amsterdam. Sesudah tanggal 3 Juni 1656 mereka dinamakan juga *College van (Commissarissen van) Huwelijkse en Kleine (Gerechts)Zaken*. Pada tanggal itu Pemerintah Agung menentukan bahwa tiap-tiap bulan *Schepenbank* boleh menunjuk dua atau tiga anggotanya untuk bersama dengan seorang anggota *College van Huwelijkse Zaken* menyidangkan perkara-perkara hukum ringan, yaitu yang menyangkut perkara-perkara yang pada dasarnya termasuk tugas *Schepenbank*, tetapi yang hukumannya maksimal 100 *realen*, 'segala tuntutan hukum sipil yang menyangkut pelecehan, pertengkaran mulut, perkelahian, luka-luka, dan sebagainya'.

Pada tahun 1673 kedua anggota *Schepenbank* yang turut menyidangkan perkara-perkara ringan dicabut. Perkara-perkara itu dipercayakan sepenuhnya kepada *College van Huwelijkse Zaken*, yang untuk seterusnya menyandang nama *College van Huwelijkse en Kleine Zaken*. Pada kenyataannya, tindakan ini melahirkan badan pengadilan yang baru.[58] Dari anggota badan itu, dua menangani perkara-perkara perkawinan, sedangkan dua orang lagi bertugas menyelesaikan perkara-perkara hukum yang ringan. Sama seperti *College van Heemraden*, badan ini diketuai oleh seorang pegawai VOC berpangkat *opperkoopman*, atau oleh seorang mantan gubernur. Pada tahun 1812 *College van Huwelijkse en Kleine Zaken* dibubarkan. Wewenangnya dialihkan kepada Magistraat kota Batavia.[59]

Sekali-sekali jabatan sekretaris atau *geheimschrijver* (yang bertugas melakukan korespondensi rahasia) dalam *College van Huwelijkse Zaken* dipegang oleh seorang notaris umum. Hal ini diketahui karena sepeninggal sekretaris Nicolaes de With (seorang *vrijburger*) dicatat bahwa jabatannya selaku seorang notaris lowong. Beberapa orang dari golongan swasta (*vrijburgers*) menyatakan ingin mengisi lowongan itu. Lalu pemerintah menunjuk Anthony Huysman sebagai sekretaris

yang baru, sedangkan Philip Kanselaer diangkat menjadi notaris umum.[60] Ternyata Huysman menjalankan terus jabatannya selaku notaris. Ia telah diterima dalam jabatan itu oleh *Hof van Holland* (pengadilan tertinggi di provinsi Holland) dan mengembannya di Batavia selama kurun waktu 1646-1673. Jadi, selama masa 1660-1673 ia menjadi notaris merangkap sekretaris *College van Huwelijkse Zaken*. Ia meninggalkan arsip yang sangat besar. Tentang Kanselaer tidak diketahui apa-apa. Tetapi tampilnya dia dalam catatan tersebut di atas membuktikan bahwa daftar notaris yang tercantum dalam Inventaris menyeluruh ini tidak lengkap.

Sejak tahun 1656 para komisaris untuk urusan perkawinan bertugas mencatat pemberitahuan resmi niat kawin (*geboden*) dalam *gebodenboek*. Pemberitahuan tersebut dilakukan pada tiga hari Minggu berturut-turut di salah satu gereja. Jika yang kawin adalah seorang Eropa, pemberitahuannya terjadi dalam ibadah berbahasa Belanda di Gereja Kota; bagi orang Kristen Asia berbahasa Portugis (orang Mardika, lihat IV.1) dalam gereja Portugis Dalam atau Luar; bagi orang berbahasa Melayu dalam ibadah jemaat berbahasa Melayu. Sesudahnya, para pendeta memberitahukan kepada komisaris apakah ada yang menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan moril atau lain-lain. Mereka mencatat nama orang yang hendak kawin dalam buku pemberitahuan niat kawin. Sebab, *Bataviase Statuten* melarang orang *burger* yang termasuk golongan Eropa kawin dengan 'orang bukan kristen, kafir, atau mor [orang Muslim dari India]'. Budak dilarang menikah dengan wanita merdeka, dan pada asasnya juga tidak bolen kawin dengan budak milik tuan lain. Para pegawai VOC yang ingin menikah wajib meminta persetujuan gubernur jenderal.[61]

Di kemudian hari, baik administrasi perkawinan dalam arsip gereja maupun yang dalam arsip *Commissarissen voor Huwelijkse Zaken* dimasukkan dalam arsip Catatan Sipil.

5. *College van Boedelmeesters van Chinese en andere onchristen sterfhuizen* atau *Boedelkamer* (Dewan Pengelola/Balai Harta Peninggalan orang Cina dan Orang bukan Kristen lain, 1640-1885)

Pada tanggal 26 Mei 1640 Pemerintah Agung melantik *College van Boedelmeesters voor de Chinese sterfhuizen* (Dewan Pengurus Harta Peninggalan orang Cina), singkatnya *Boedelkamer* (Balai Harta Peninggalan).[62] Di rumah duka orang Cina sering timbul kericuhan akibat penipuan atau penggelapan uang. Untuk mencegahnya, Pemerintah Agung mengatur penyelesaian warisan orang Cina dengan ketat. *College* tersebut, yang terdiri atas dua orang Belanda dan dua orang Cina, bertugas mengawasi penyelesaian itu. Di kemudian hari, medan kegiatan mereka mencakup juga rumah duka penduduk Asia lainnya.

Mula-mula para pemimpin masyarakat Cina enggan menerima kegiatan *College van Boedelmeesters*. Mereka memandang campur tangan pemerintah kolonial dalam persoalan harta warisan orang Cina sebagai pelanggaran hak-hak mereka. Ada orang Cina yang meninggalkan Batavia dengan maksud menghindari campur tangan Balai Harta Peninggalan. Banyak yang memprotes. Pada tahun 1648 Pemerintah Agung bersedia membubarkan *Boedelkamer* itu. Tetapi tujuh tahun kemudian badan itu didirikan kembali, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya.[63] Sesudah beberapa waktu *Boedelkamer* ini mengurus juga harta peninggalan orang bukan Cina. Beberapa orang Jawa diangkat menjadi anggota *college*, yang pada tahun 1752 beranggotakan empat orang Belanda (dua pegawai VOC dan dua orang swasta) dan empat orang Asia. Nama mereka ini: Soeta Wangsa (kapten orang Jawa di *Oosterkwartier*, wilayah timur kota) dan Tan Souko (seorang Cina), Bakti (kapten orang Jawa di *Westerkwartier*) dan Que Hoko (juga seorang Cina).[64] Ternyata *Boedelkamer* juga sering menangani warisan warga masyarakat 'Mor' (Islam India) dan Arab. Jadi, sebagaimana dinyatakan pula oleh nama badan itu, kegiatannya mencakup semua golongan bukan Kristen.

Arsip *boedelmeesters* mirip arsip *Weeskamer*. Ordonansi yang mengatur kegiatan mereka merupakan salinan (dengan beberapa penyesuaian) ordonansi untuk Balai Yatim Piatu. Di kemudian hari, ordonansi ini mengalami perubahan kecil-kecil. Sama seperti arsip *Weeskamer*, dalam arsip *Boedelkamer* terdapat *boedelmeesterkennissen* (pernyataan *boedelmeester*) dan salinan surat warisan (yang disimpan bersama-sama dalam rumah sakit orang Cina), buku-buku lelang (lelang diadakan dengan dihadiri *boedelmeesters*), buku-buku induk dan jurnal-jurnal modal, dan seterusnya. Maka arsip yang tersisa merupakan sumber informasi yang penting untuk sejarah orang Asia (khususnya orang Cina) dari seberang laut yang tinggal di kota Batavia. Sayangnya, bagian terbesar arsip ini hilang.

Setiap tahun anggota-anggota Balai Harta Peninggalan Cina-Asia ini dinominasi oleh *Schepencollege* dan dipilih oleh Pemerintah Agung. Bila seorang Cina meninggal dunia, janda, sanak saudara, tetangga, bahkan para budak

wajib memberitahukan kematiannya sesegera mungkin kepada ketua Balai tersebut. Yang alpa melakukannya dikenai hukuman denda sebesar 25 *realen*, bahkan dengan hukuman badan. Jika seorang Cina dari Batavia meninggal dunia di laut, nakhoda kapalnya harus segera, bersama dengan beberapa saksi, mencatat surat-surat orang yang meninggal itu dan menyimpannya sampai kapal masuk pelabuhan Batavia. Setelah diberi tahu, beberapa utusan *Boedelkamer* segera mencatat hutang-piutang orang yang meninggal bersama dengan harta miliknya dan uang tunai yang dimilikinya. Jika ahli waris yang sah masih di bawah umur, absen, atau tidak mampu, harta-hartanya dilelangkan, lalu hasilnya dibayarkan kepada para kreditor. Biaya hidup sanak saudara yang ditinggalkan yang masih di bawah umur diambil dari bunga modalnya. Sama seperti anak yatim piatu berkebangsaan Eropa, yatim piatu Cina 'dititipkan pada orang-orang baik budi dan dididik serta dibesarkan sesuai dengan status mereka'.[65]

Boedelmeesters mengawasi pula rumah sakit orang Cina. Mereka berwenang memungut pajak pemakaman, perkawinan, dan sandiwara (wayang Cina). Hasil pajak itu digunakan untuk mengasuh orang miskin dan merawat orang sakit dalam masyarakat Cina.[66]

Hoge Regering dan *College van Schepenen* berpengaruh besar terhadap Balai Harta Peninggalan. Sama seperti lembaga-lembaga Batavia lainnya, Balai itu wajib untuk setiap tahun menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada kedua instansi tersebut. Berkas-berkas berisikan ekstrak-resolusi *Boedelkamer* (sekali-sekali di dalamnya ditemukan juga ekstrak-resolusi badan lain) yang masih tersimpan memperlihatkan bahwa Balai Harta Peninggalan orang Cina sungguh-sungguh terintegrasi dalam jaringan lembaga-lembaga pemerintahan kota. Jumlah orang Asia di Batavia jauh melebihi jumlah orang Kristen pada umumnya dan orang Eropa pada khususnya, tetapi dibandingkan Balai Yatim Piatu *Boedelkamer* termasuk miskin. Pada tahun 1680, dalam sebuah surat kepada Pemerintah Agung, *boedelmeesters* mengeluh harus beperkara setiap hari untuk menyelamatkan harta peninggalan warga Cina. Biaya proses harus diambil dari harta itu, sehingga acap kali sedikit saja yang tersisa atau biayanya malah melebihi jumlah hartanya, karena harta itu kurang berharga dan tidak terpelihara. Maka *boedelmeesters* mengajukan usul agar mereka diperbolehkan langsung naik banding ke *Raad van Justitie*, tanpa lebih dahulu mengajukan perkaranya ke *Schepenbank*. Akan tetapi, usul ini ditoleh oleh Pemerintah Agung.[67]

Pada abad ke-18, modal *Boedelkamer* berangsur menjadi lebih besar. Oleh Daendels, *weeskamer* dan *boedelkamer* di kota-kota lain digabungkan, tetapi di Batavia kedua lembaga tersebut tetap terpisah. Baru dengan ordonansi tanggal 27 Januari 1885 *College van Boedelmeesters* dibubarkan dan urusannya diserahkan kepada *Weeskamer* kota Batavia. Jumlah anggota *Weeskamer* diperluas dengan satu anggota berkebangsaan Eropa, satu orang Cina, dan dua anggota 'Bumiputera'. Selama abad ke-19 pendapatan dan pengeluaran *Boedelkamer* kira-kira sama dengan yang dinikmati oleh *Weeskamer*, dengan catatan bahwa jumlah anak yang diasuh oleh *Boedelkamer* jauh lebih besar.[68]

6. Para notaris (1620-1822)

Notaris pertama yang dilantik di Jakatra (Batavia) ialah Melchior Kerchem,[69] yang hanya menjabat selama beberapa bulan saja (27 Agustus – 12 November 1620).[70] Ia ini merangkap sekretaris *Schepenbank*, tetapi dalam bulan November tahun yang sama jabatan ini sudah dipisahkan dari jabatan notaris umum (*publiek notaris*). Kerchem diberi tugas melaksanakan jabatan notaris dengan menyusun akta-akta dan kontrak-kontrak bagi masyarakat umum. Surat-surat instruksi yang pertama bagi para notaris dikeluarkan pada tahun 1625 dan kemudian dilengkapkan dengan pengadaan perintah dan peraturan baru, yang pada tahun 1642 dicantumkan dalam *Bataviase Statuten*, yang pada tahun 1766 diganti dengan *Nieuwe Bataviase Statuten*.[71]

Notariat harus dipandang sebagai fasilitas pelengkap bagi tugas para sekretaris *Raad van Justitie* dan *College van Schepenen*. Mereka ini menyusun akta-akta di hadapan saksi-saksi. Masing-masing didampingi oleh seorang juru tulis bersumpah, yang juga bertugas menerima warga kota yang datang ke loket-loket pemerintahan. Sampai tahun 1650 jumlah notaris di kota Batavia selalu dua orang, sesudahnya jumlah itu bertambah menjadi tiga atau empat orang. Makin besar kota dan makin rumit masyarakatnya, makin sering para notaris mengesahkan akta-akta bagi orang-orang yang tidak mereka kenal. Bila terjadi pertengkaran, biasanya disusun surat keterangan saksi (*attestatie*) di kantor notaris. Pada saat itu acap kali notaris bertindak agak sembrono: orang yang kebetulan sedang lewat, atau kenalan, diminta tampil sebagai saksi. Pada tahun 1668 *Hoge Regering* memutuskan memberantas kebiasaan menampilkan saksi-saksi yang tidak dikenal. Semua notaris disuruh menghadap *Raad van Justitie*. Di sana dibacakan pasal 9 dari plakat lama, yang pada tahun 1540 dikeluarkan oleh Kaisar Jerman, Karel V, lalu diancamkan sanksi-sanksi. Pasal tersebut menentukan bahwa para

notaris wajib menyusun register dan protokol semua kontrak, surat wasiat, dan akta lain yang dilangsungkan. Mereka dilarang membuat obligasi (surat pengakuan utang), perjanjian atau kontrak, *alienatie* (pemindahtanganan), atau surat wasiat bagi orang-orang yang tidak mereka kenal, dan diwajibkan mencantumkan dalam akta kota atau tempat tinggal orang-orang yang meminta melangsungkan akta.[72]

Semua notaris harus menempuh ujian di hadapan *Raad van Justitie* dan diawasi oleh badan itu. Meski demikian, sang notaris adalah pengusaha swasta, bukan pegawai pemerintah. Ia pun wajib melayani setiap orang, kaya atau miskin, jika perlu dengan cuma-cuma, 'demi Allah' (*pro Deo*).[73] Adanya pedoman ini menjamin notaris menawarkan jasanya kepada semua orang, kaya atau miskin, Eropa atau Asia, merdeka atau budak. Hanya saja, disebabkan kewajiban itu pendapatan seorang notaris tidak seberapa. Maka mula-mula para notaris berstatus agak rendah, mereka boleh masuk barisan pertahanan sipil (*schutterij*), tetapi tidak dapat menjadi anggota salah satu lembaga pemerintahan kota. Ketentuan tersebut terakhir ini baru dicabut pada tahun 1682.[74]

Kendati demikian, jabatan notaris cukup menarik, sehingga sering diturunkan dari ayah ke putranya. Johannes Mauris mendidik anaknya Johannes Mauris Jr. sejak dari kecil. Tetapi anaknya itu hanya boleh mengambil alih kantor ayahnya; ia tidak diperbolehkan mendirikan kantor baru. Mungkin sekali protokol-protokol Johannes Sr. ikut beralih ke tangan Johannes Jr., sama seperti seorang notaris baru kadang-kadang mengambil alih protokol-protokol notaris terdahulu. Umpamanya, notaris Pieter van Leeuwen, yang pada tahun 1669 mengajukan permohonan kepada Pemerintah Agung agar diperbolehkan mengambil alih protokol-protokol Meyndert Hommes, yang telah meninggal. Permohonan itu dikabulkan.[75]

Di antara para notaris ada yang datang dari negeri Belanda ke Batavia dengan maksud menjadi notaris di sana. Contohnya adalah Mr. Jan van Henk, seorang pengacara yang dalam bulan September 1670 tiba di Banten dengan kapal Inggris 'Marchand' di luar ikatan dinas. Tidak lama kemudian ia menetap di Batavia sebagai *vrijburger* (orang swasta) dan harus menunggu selama satu tahun sebelum diperbolehkan menjalankan jabatan notaris.[76] Atau Adriaen Steerlincx, seorang penghibur orang sakit (*krankenbezoeker*) yang sejak muda belajar notariat dan sudah mendapat pengakuan oleh *Hof van Holland*. Selama beberapa tahun ia menjadi notaris di Amsterdam. Ketika notaris Jacob Overheul meninggal (1675), Steerlincx menggantikannya.[77] Contoh lain adalah David Dispontijn, yang sebelum mengajukan permohonan agar diperbolehkan menjadi notaris bekerja sebagai penata buku.[78] Sama seperti Steerlincx, Frederik Michault telah mendapat pengakuan oleh *Hof van Holland* dan menjadi notaris di Banda sebelum diangkat di Batavia (1682).[79] Pada tahun itu juga David Reguleth dari Solor, seorang asisten berdarah campuran (*mesties*), diangkat menjadi notaris menggantikan Jan Keysers dari Breda, yang telah mendapat izin pulang ke tanah air. Sebelumnya, Reguleth sudah bertahun-tahun lamanya menjadi juru tulis di Batavia.[80]

Contoh-contoh ini menjelaskan bahwa jumlah peminat untuk jabatan notaris cukup besar, dan bahwa mereka mau saja menanti terbukanya lowongan. Tetapi para notaris yang sedang menjabat enggan meningkatkan jumlah kantor, sebab bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Sesudah kematian notaris Reynoldus Brouwerius (1680), para notaris datang menghadap di Benteng sambil menyatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan lima notaris; kiranya tiga atau empat sudah mencukupi. Pernyataan mereka tidak dihiraukan dan Pemerintah Agung, 'berdasarkan pertimbangan yang sehat', memutuskan untuk mendesak para notaris agar bekerja dengan lebih rajin. Maka seorang penata buku bernama Christoffel van Outers diangkat menjadi notaris, setelah diuji oleh *Raad van Justitie*.[81]

Di kemudian hari, jumlah notaris berkurang menjadi empat, lalu pada tahun 1718 jumlahnya ditingkatkan lagi menjadi lima orang. Dua tahun kemudian empat orang dianggap mencukupi, tapi tahun 1731 jumlahnya sudah bertambah menjadi enam orang. Para notaris ini sungguh-sungguh menjaga pengeluaran uang mereka: dari lima notaris yang aktif pada tahun 1751, empat orang tinggal di wilayah barat kota Batavia (di daerah murah), dan tidak ada yang bermukim di bagian timur. Notaris Gouset, yang baru diangkat, diharuskan membuka kantor di Tijgersgracht, di kawasan timur yang mahal.

Juga pada abad ke-18 naluri meningkatkan omzet kadang-kadang berbentur dengan ketelitian, khususnya dalam mencari saksi-saksi. Sumpah notaris perlu diperbaharui, dan orang yang menghadap di kantor notaris (komparan) diwajibkan menandatangani akta-akta yang dilangsungkan. Pada tanggal 24 Agustus 1672 semua surat perintah dan peraturan berkenaan dengan notariat 'diperbaharui, diperluas, dan ditetapkan' oleh Pemerintah Agung. Kepada *Raad van Justitie* dianjurkan agar surat perintah

dan peraturan tersebut dikumpulkan dalam map dan setiap tahun dibacakan kepada para notaris. Namun, sesudah itu pun sering terjadi kekeliruan dalam membuat akta, dan sering juga Pemerintah Agung menetapkan peraturan baru, khususnya berkenaan dengan pengesahan surat-surat wasiat pegawai Kompeni.

Sesudah tahun 1775 jumlah penduduk kota Batavia berkurang. Kemunduran itu berdampak pula terhadap kantor-kantor notaris, sebab pekerjaan berkurang. Pada tanggal 14 Mei 1773 jumlah notaris di dalam kota dikurangi menjadi tiga atau empat, ditambah satu orang notaris di luar kota. Sejak tanggal 13 Juli 1792 hanya tiga notaris yang diperbolehkan menjalankan fungsinya di dalam kota.[82] Sekitar tahun 1789 para notaris diizinkan membuat akta-akta di luar kawasan kota, dan diangkat notaris-notaris baru bagi daerah *Ommelanden*. Pada tahun 1822 status notaris mengalami perubahan: mereka menjadi pegawai pemerintah. Tugas mereka diatur dalam peraturan yang baru.[83]

Di antara semua arsip kota Batavia, arsip notariatlah yang paling mengakrabkan kita dengan masyarakat multi-etnis di kota itu. Sebabnya, orang-orang Asia sering mendatangi kantor notaris. Sebagaimana telah disinggung di atas, peraturan tahun 1625 menentukan bahwa para notaris harus melayani 'semua orang yang memintanya', termasuk orang miskin, yang harus dibantu tanpa meminta pembayaran. Agaknya dari semula pelayanan kepada orang-orang Asia berjalan lancar. Mulai tahun 1642 orang Cina wajib melangsungkan surat pengakuan utang pada seorang notaris. Untuk seterusnya berlaku kewajiban mutlak membacakan dan menandatangani akta di hadapan saksi. Akibatnya, sejumlah besar orang Asia ikut masuk kantor notaris sebagai saksi. Dengan demikian arsip para notaris kota Batavia merupakan arsip terpenting tentang hal ihwal masyarakat Asia di Batavia sepanjang waktu.

IV. Lembaga-lembaga gerejawi di Batavia

1. *Kerkenraad* (Majelis Gereja) Gereformeerd di Batavia (1621)

Pada tanggal 21 Januari 1621 berlangsung sidang pertama majelis gereja Gereformeerd (Protestan Calvinis) di Batavia, yang telah dibentuk beberapa minggu sebelumnya atas desakan Gubernur Jenderal J.P. Coen. Beberapa minggu sebelumnya, pada tanggal 3 Januari, sekitar empat puluh warga jemaat itu untuk pertama kalinya merayakan perjamuan kudus, di bawah pengawasan majelis. Kebutuhan akan pelayanan sakramen-sakramen menjadi alasan pembentukan lembaga gerejawi tersebut.

Majelis gereja di Batavia (1621) bertugas mengatur baik jemaat berbahasa Belanda maupun kedua jemaat lainnya, yaitu yang berbahasa Portugis dan Melayu. Setiap jemaat memiliki gedung gereja sendiri. Ibadah jemaat berbahasa Melayu diadakan dalam 'gereja rumah sakit Melayu' (didirikan 1678). Jemaat 'Portugis' malah memiliki tiga gedung gereja, yaitu 'Portugese Binnenkerk' (Gereja Kota, 1672), 'Portugese Buitenkerk' (di luar kota, kini gereja Sion, 1695), dan gereja kampung Tugu. Notula majelis gereja Batavia, yang merupakan sumber informasi yang penting, diterbitkan oleh J. Mooij (sampai tahun 1692).[84]

College van Diakenen (Dewan Diaken-diaken, Diakoni, 1648) melayani pula semua jemaat tersebut. Anggota majelis dan diakoni adalah orang-orang Eropa atau Indo-Eropa (selama dua abad, hanya satu orang Kristen Asia yang pernah menjadi anggota majelis). Arsip-arsip kedua lembaga tersebut menyajikan banyak data tentang golongan budak dan orang merdeka (yang pada abad ke-17 sering berasal dari India) yang telah menjadi orang Kristen Protestan. Golongan *Mardijkers* (Mardika, merdeka) ini terdiri atas orang-orang Kristen Asia dan Indo-Eropa (yaitu anak-anak yang tidak disahkan, dari hubungan campuran). Pada abad ke-18 jumlah mereka makin lama makin kurang, sedangkan unsur Eropa dan Indo-Eropa dalam jemaat semakin menonjol. Bagi Gereja Protestan yang tradisional, pelaksanaan disiplin gereja dan pelayanan kepada orang miskin merupakan sarana yang tepat dalam upaya mengkristenkan dan menertibkan berbagai golongan penduduk.[85]

Majelis gereja di Batavia adalah badan yang berdiri sendiri (otonom) dan tidak tunduk para lembaga lain apa pun. Kendati demikian, gaji para pendeta, penghibur orang sakit, dan guru-guru sekolah ditanggung oleh VOC. Dalam buku-buku resolusi *Hoge Regering* disinggung pelbagai urusan dan masalah yang menyangkut gereja, terutama tenaga gereja. Di samping itu, majelis gereja di Batavia tetap mempunyai hubungan erat dengan beberapa klasis (pengurus gereja se-daerah) di Nederland, khususnya dengan Klasis Amsterdam, Middelburg, Hoorn, dan Enkhuizen, sebab di kota-kota tersebut terdapat *Kamer* VOC, dan dengan tiga sinode wilayah, yaitu Sinode Holland Utara, Holland Selatan, dan Zeeland. Badan-badan gerejawi di negeri Belanda ini mencari, menguji, dan mengutus tenaga pendeta serta penghibur orang sakit. Ketiga sinode tersebut biasa mengirim laporan-laporan mereka kepada majelis-majelis gereja di Asia. Laporan-laporan ini

tetap tersimpan dalam arsip gereja Batavia. Setiap tahun majelis gereja di Batavia mengirim pula laporan umum mengenai keadaan jemaat-jemaat dan sekolah-sekolah di wilayah VOC kepada klasis-klasis dan sinode di Holland dan Zeeland. Laporan tersebut disebut *Generale Kerkstaat.* Akan tetapi, hubungan dengan Nederland dipelihara juga melalui surat-surat pribadi dan pemberitaan lisan. Berbeda dengan laporan-laporan umum VOC sendiri, surat-surat resmi badan-badan gerejawi ditulis dengan singkat dan padat.

Informasi yang dimasukkan ke dalam *generale kerkstaten* berasal dari majelis jemaat lainnya di Asia, yang juga berdiri sendiri. Dalam arsip gereja disimpan berkas-berkas surat-surat masuk dari Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Timor, dan lain-lain. Hanya, berkas-berkas ini dimasukkan ke dalam *gewestelijke archieven* (arsip daerah), sehingga baru saja ditemukan. Arsip gereja merupakan sumber penting bagi penelitian di bidang sejarah gereja tertua di Asia, penyebaran agama Kristen di beberapa daerah di Indonesia Timur, dan hubungan antara gereja Kristen dan Islam.[86]

Majelis gereja terdiri atas pendeta-pendeta setempat dan para penatua. Tugasnya mengatur ibadah gereja, termasuk pelayanan sakramen baptisan dan perjamuan kudus, pelaksanaan disiplin gereja, pertolongan kepada orang miskin (hingga tahun 1648), penggembalaan warga jemaat oleh para penghibur orang sakit, dan pemberian pelajaran agama (katekisasi) oleh guru atau calon guru agama; mengawasi pekerjaan para guru sekolah dan pendidikan guru agama serta guru sekolah, mengusahakan penerjemahan bahan pelajaran agama dan Alkitab sendiri, pemindahan pendeta-pendeta ke jemaat-jemaat lain di Asia, dan terakhir juga melakukan korespondensi dengan sejumlah jemaat dan badan gerejawi di negeri Belanda. Dapat diduga bahwa dengan demikian beban kerja majelis gereja di Batavia lebih berat dibandingkan dengan majelis jemaat di kota-kota Belanda.

Sampai tahun 1669 jumlah enam pendeta dianggap sudah cukup untuk melayani jemaat di Batavia. Jumlah penatua juga enam orang, tetapi ketika pada tanggal 10 Januari 1673 dipilih majelis baru, jumlah mereka ditingkatkan menjadi delapan orang.[87] Lima tahun kemudian, majelis mengajukan permohonan supaya jumlah penatua ditingkatkan lagi menjadi sepuluh orang. Alasannya, selain pertumbuhan jemaat, juga kenyataan bahwa tidak jarang seorang penatua dari golongan pegawai Kompeni dipindahkan ke tempat lain di tengah masa pelayanannya selaku penatua, sehingga terjadi lowongan.[88] Formasi pendeta mencapai titik puncak pada tahun 1749; pada waktu itu jemaat Batavia dilayani oleh dua belas pendeta. Dalam banyak bidang majelis dapat menentukan sendiri kebijakan yang hendak diambil. Tetapi sejak tahun 1629 rapat-rapat sering dihadiri oleh seorang *commissaris-politiek*, seorang pejabat tinggi (anggota *Raad van Indië*) yang mewakili pemerintah dan bertugas mengawasi kelakuan majelis dalam segala hal yang menyangkut urusan-urusan pemerintahan. Umpamanya, *commissaris-politiek* ini membaca surat-surat majelis kepada badan-badan gerejawi di negeri Belanda, dan ikut memiliki suara dalam menentukan tempat kerja seorang pelayan gereja di wilayah VOC.

2. *College van Diakenen* atau Diaconie (Dewan Diaken, Diakoni, 1648)

Diakoni jemaat Gereformeerd adalah satu-satunya badan Belanda di kota Batavia yang menyediakan pertolongan bagi orang-orang miskin. Pada tahun 1621, untuk pertama kalinya dipilih dua orang diaken. Menurut tata gereja tahun 1624 mereka bertugas mengumpulkan sumbangan dan menyampaikan bantuan kepada yang berkebutuhan. Mereka bertanggung jawab kepada majelis gereja. Sampai tahun 1648 para diaken termasuk anggota majelis, tetapi mulai tahun itu mereka menjadi lembaga tersendiri. Hanya saja, arsip-arsip memperlihatkan bahwa sudah sebelumnya mereka mempunyai administrasi sendiri, yaitu buku kas untuk kas besar (*grote kas*), buku untuk mendaftarkan hasil kolekte (*collecteboeken*), jurnal-jurnal atau *maandrekeningen* (rekening bulanan), buku-buku induk (*grootboeken*), buku pembagian (*uitdelingsboek* atau *kleine kas*), dan rekening bulanan Wisma Orang Miskin (*armenhuis*) dan Wisma Yatim Piatu (*weeshuis*).[89]

Mulai tahun 1648 pada diaken merupakan badan tersendiri; yaitu *College van Diakenen*, yang beranggotakan lima orang; satu tahun sesudahnya jumlah ini ditingkatkan menjadi enam; pada tahun 1669 ada delapan, 1671 sepuluh, dan sejak 1682 jumlah diaken menjadi dua belas orang. Sama seperti majelis, *College van Diakenen* berkumpul dalam ruang konsistori gereja Belanda (*Nederduitse kerk*). Kendati demikian, mereka tidak tunduk pada majelis, tetapi berdiri sendiri. Administrasi diakoni luas sekali; untungnya sebagian besar arsip mereka masih tetap tersimpan. Sebaliknya, administrasi *weeshuis* dan *armenhuis* telah hilang. Buku-buku resolusi para diaken juga penting sekali. Hanya buku-buku dari abad ke-18 yang masih tetap tersimpan.

Pada abad ke-18 *college van diakenen* bersidang dua kali sebulan. Masa jabatan mereka tidak melebihi dua tahun, maka setiap tahun separuh jumlah para diaken meletakkan jabatannya. Pada

awal bulan Februari para diaken berkumpul untuk menunjuk anggota-anggota baru. Sesudahnya *college* yang baru membagi-bagikan fungsi-fungsi yang harus diisi, yaitu:

– dua orang *buitenregent* (pengurus luar, yang tinggal di luar) Wisma Yatim Piatu;
– dua orang *buitenregent* untuk Wisma Orang Miskin;
– dua orang *visitateur* (pelawat) untuk *buitenarmen*, artinya orang miskin yang tetap tinggal di rumah sendiri;
– dua orang *procesbezorger* merangkap *legaatbezorger*. Mereka ini bertugas menagih denda yang telah dikenakan oleh *Raad van Justitie*, dan menerima derma, hibah wasiat, uang dari peti orang miskin, dan sebagainya;
– seorang penata buku untuk rekening bulanan yang sedang berjalan;
– seorang *grootkassier* (kasir umum);
– seorang *kleinkassier* (kasir yang khusus menyalurkan pembayaran bantuan kepada orang miskin);
– seorang *scriba* (panitera) atau *resolutiehouder*, yang bertugas mencatat semua keputusan dalam buku resolusi.

College van Diakenen mengurus lembaga-lembaga pengasuh anak yatim piatu. Sejak pemerintah menangani masalah adopsi (1683), mereka makin lama makin banyak menaruh perhatian pada anak-anak yang lahir di luar nikah. Sejumlah besar anak Indo-Eropa ditampung dalam Wisma Yatim Piatu atau di rumah orang swasta. Pada abad ke-17 diakoni mengasuh juga banyak orang miskin berkebangsaan Asia yang tinggal tersebar di kota. Setelah pemberian pertolongan kepada orang miskin perseorangan mengalami reorganisasi menyeluruh, Wisma Orang Miskin (*armenhuis*) menjadi tempat penampungan utama bagi orang yang sakit, miskin, atau sakit jiwa (1684). Karena jumlah penderita sakit kusta di kota bertambah terus, pada tahun 1666 dibangun panti kusta di dekat benteng Angke. Tetapi adanya bahaya penularan menyebabkan panti kusta ini bersama penduduknya dipindahkan ke Pulau Purmerend (disebut juga Pulau Sakit, kini Pulau Bidadari) di Teluk Jakarta. Secara resmi, panti ini tidak termasuk lembaga yang diatur oleh kaum diaken. Namun, sejak tahun 1690 pengeluarannya dibayar dari hasil kolekte yang diadakan dalam ibadah gereja. Sama seperti para diaken dan wali gereja (lihat di bawah), kedua *buitenregenten* panti kusta setiap tahunnya wajib memberi pertanggungjawaban keuangan di ruang sidang Dewan Urusan-urusan Perkawinan dan Perkara-perkara Hukum yang Ringan.

3. *College van Kerkmeesters* (Dewan Wali Gereja, 1655)

Pada tahun 1655 Pemerintah Agung mengangkat dua wali gereja, yang bertugas mengelola harta milik gereja, yaitu gedung-gedung gereja, pekuburan, dan harta bergerak dalam gedung gereja (umpamanya bangku dan kursi, lampu, alat-alat perjamuan kudus). Majelis gereja sendiri tidak memiliki wewenang di bidang ini. Para wali gereja harus menyediakan dana dan semua sarana materiil lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Agung dianggap sebagai 'wali gereja tertinggi' – sama seperti pemerintah kota di negeri Belanda. Rekening tahunan wali gereja, yang harus disahkan oleh gubernur jenderal dan Dewan Hindia, dapat ditemukan dalam buku-buku resolusi *Hoge Regering*.

Mula-mula hanya ada dua *kerkmeesters* bagi gereja Belanda di kota. Pada tahun 1665 gereja Portugis mendapat juga dua orang wali. Pendapatan gereja ini, sama seperti dana gereja Belanda di kota, berasal dari uang makam (*grafgeld*), penjualan makam, sewa kain penutup peti mati, dan bunga modal yang dimiliki. Rekening tahunan merupakan sumber informasi yang utama berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran wali gereja, khususnya pada abad ke-17.

Menjelang akhir abad ke-17, gereja Belanda, gereja Portugis Dalam dan gereja Portugis Luar semua memiliki penggali kubur (*doodgraver*) sendiri. Penduduk Batavia yang termasuk warga jemaat Gereja Kota dimakamkan di pekuburan Belanda (*Hollandsche kerkhof*). Para penggali kubur mencatat pemakaman dalam buku pemakaman (*doodgraverrollen*). Mereka wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentangnya kepada para wali gereja. Penyewaan dan penjualan makam serta hasil sewa peralatan pekuburan juga dicatat. Selain itu, para wali gereja mencatat juga nama orang yang telah meninggal dalam rumah sakit Kompeni (*hospitaalsdoodrol*) dan orang yang dimakamkan di pekuburan budak. *Doodgraverrol* pekuburan Belanda, pekuburan Portugis Dalam, pekuburan Portugis Luar, pekuburan budak dan yang di wilayah Oosterveld (wilayah di sebelah timur kota Batavia) yang masih tersimpan dimasukkan dalam Arsip *Burgerlijke Stand* (Catatan Sipil).

4. Majelis Gereja Gereformeerd di Semarang (1753)

Pada awal abad ke-18 para pendeta di Batavia mulai melakukan kunjungan berkala ke tempat-tempat lain di Pulau Jawa yang mempunyai garnisun VOC. Di sana mereka melakukan tugas

penggembalaan jiwa, dan melayankan baptisan kudus serta perjamuan kudus.[90] Pada tahun 1712 Pdt. Abraham Feylingius menyampaikan laporan kunjungannya ke Rembang, Semarang, Tegal, dan Cirebon kepada majelis gereja di Batavia. Pada masa itu jemaat Kristen di kota-kota tersebut masih sangat kecil. Umpamanya, di Cirebon Pdt. Feylingius merayakan perjamuan kudus bersama satu orang saja, yaitu Residen Jongbloet. Laporan-laporan yang disampaikan oleh Pdt. Antoni Hoijer (1716), Pdt. Philip Capelle (1719), Pdt. Jacobus Canter Visscher (1719), dan Pdt. Johannes Wagardus (1738) memperlihatkan pula bahwa kegiatan para pendeta dari Batavia di Pulau Jawa hanya diarahkan kepada orang-orang Kristen Eropa saja.

Sesudah pemberontakan orang Cina (1741-1743) dan setelah diikatnya perjanjian baru dengan Susuhunan Mataram, VOC semakin menancapkan kekuasaannya di Pulau Jawa. Gubernur Jenderal G.W. van Imhoff (1743-1750), seorang Lutheran, bersikap positif terhadap usaha peluasan agama Kristen di Jawa. Menurut pendapatnya, semangat menyebarkan agama Kristen tidak bertentangan dengan politik yang bijaksana. Saat melakukan kunjungan ke istana Kartasura (1746) ia mengemukakan pula hal penempatan dua orang pendeta di pantai utara Pulau Jawa, satu di Semarang dan satu lagi di Surabaya. Pendeta Semarang akan juga diberi tugas melakukan kunjungan ke Surakarta, Tegal, Cirebon, Jepara, dan Rembang setiap tiga bulan sekali. Tetapi baru pada tahun 1753 majelis gereja di Batavia dapat mengutus beberapa orang pendeta ke Semarang. Pdt. Johannes Wilhelmus Swemmelaar menetap di kota itu dan membentuk majelis jemaat di sana. Dalam laporan yang panjang lebar (1756) dicantumkannya informasi mengenai kelompok-kelompok kecil orang Kristen di sebelah barat Semarang (Pekalongan, Tegal) dan di sebelah timur kota itu (Kuala Demak, Jepara, Juwana, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Bangkalan, dan Sumenep). Ada juga orang-orang Kristen di Ungaran, Salatiga, Bogo, dan Yogyakarta.

Menonjollah bahwa dalam kelompok-kelompok tersebut terdapat sejumlah besar Lutheran dan Katolik. Biasanya warga Lutheran ikut mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Di Tegal, gereja pertama dibangun oleh Residen Carel Gustaef Falk, seorang Lutheran; di Surabaya contohnya diikuti oleh Residen Abraham Christoffel Coertsz, yang adalah juga seorang Lutheran (1759). Arsip-arsip kedua gereja tersebut tidak tersimpan. Majelis gereja di Semarang merupakan majelis pusat, yang secara berkala mengutus pendeta ke jemaat-jemaat tetangga untuk memimpin ibadah gereja dan melayankan baptisan. Arsip jemaat Semarang tersimpan mulai dari saat pembentukan majelis gereja permanen oleh Pdt. Swemmelaar dalam bulan November 1753. Selain informasi mengenai jemaat di Semarang sendiri, dalam arsip ini terdapat juga data-data mengenai kelompok-kelompok Kristen lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

5. Majelis Gereja Lutheran di Batavia (1746)

Dalam tulisannya ‘Consideratiën over den tegenwoordigen staat van de Nederlandsche Oostindische Compagnie’ (Pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan VOC sekarang ini, 1741), Gubernur Jenderal baron G.W. van Imhoff mengusulkan antara lain agar agama Lutheran diakui resmi di kota Batavia dan di pemukiman Belanda di Tanjung Harapan.[91] Usul ini diterima. Pada tanggal 3 April 1742 *Heren Zeventien* memutuskan untuk mengizinkan ibadah Lutheran di wilayah VOC. Beberapa bulan kemudian, sesudah pelantikan Van Imhoff selaku gubernur jenderal, Pemerintah Agung mengeluarkan surat izin yang memberbolehkan jemaat Lutheran membangun gereja di Batavia (8 Oktober1743). Tanggapan para pendeta Gereja Gereformeerd terhadap keputusan ini sangat negatif. Tiga tahun kemudian tibalah pendeta Lutheran yang pertama. Christoffel Miechels (Juli 1746). Kehadirannya segera menimbulkan kesulitan. Para pendeta Gereformeerd tidak setuju kalau jemaat Lutheran mengumpulkan uang untuk warganya yang miskin, mengikat tali perkawinan, membaptis, dan memakamkan warga yang meninggal di pekuburan sendiri. Singkatnya, Gereja Gereformeerd ingin mempertahankan monopoli yang telah dimilikinya selama satu abad lebih.

Penahbisan gedung gereja Lutheran berlangsung pada tanggal 28 September 1749. Jumlah anggota bertambah perlahan-lahan. Namun, aliran Lutheran berhasil memperoleh kedudukan tersendiri dalam masyarakat kolonial. Menjelang akhir abad ke-18 perbedaan antara orang Lutheran dan warga Gereformeerd semakin memudar. Dalam kantor-kantor VOC lainnya berlangsung perkembangan serupa. Di Semarang dan lain-lain tempat di pantai utara Pulau Jawa warga Lutheran, bahkan juga orang Katolik, membawa anak mereka untuk dibaptis oleh pendeta Gereformeerd. Pada masa itu jemaat-jemaat di Jawa bersifat oikumenis.

Sesudah masa pemerintahan Inggris (1811-1816) banyak orang beranggapan lebih baik kedua lembaga gereja tersebut digabungkan. Raja Willem

I (1814-1840), yang memegang kuasa tertinggi atas daerah-daerah jajahan Belanda, adalah pendukung kesatuan gereja di Hindia Belanda. Dengan Keputusan Raja bertanggal 11 Desember 1835 ditetapkannya bahwa orang-orang Protestan harus bergabung menjadi satu lembaga gereja.[92] Lima tahun kemudian ditetapkan *Reglement op het Bestuur der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië* (peraturan mengenai kepemerintahan Gereja Protestan di Hindia Belanda) yang mengatur organisasi badan gereja yang hendak didirikan. Lalu, pada tahun 1844 *Bestuur van de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië* (Pengurus Gereja Protestan di Hindia Belanda) mulai melaksanakan tugasnya. *Bestuur* ini menggantikan majelis gereja Batavia sebagai badan pengurus pusat yang memperhatikan kepentingan jemaat-jemaat Kristen Protestan di seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Asia. Selain ketua, yang adalah salah seorang *Raad van Indië* atau seorang pejabat tinggi yang lain, Pengurus beranggotakan semua pendeta yang melayani jemaat Batavia bersama tiga warga jemaat yang terkemuka. Tidak ada pengunduran diri berkala para anggota. Bila terjadi lowongan, pengurus mengajukan tiga calon, lalu gubernur jenderal mengangkat salah seorang di antaranya (*Reglement*, pasal 6). Di Batavia sendiri, jemaat Lutheran telah menyatakan bersedia merayakan perjamuan kudus bersama dengan warga Gereja Gereformeerd pada tahun 1821. Kendati demikian, baru pada tahun 1854 jemaat Gereformeerd dan Lutheran di Batavia benar-benar bersatu. Untuk seterusnya majelis gereja Protestan di Batavia hanya mengurus jemaat setempat. Notula *Kerkbestuur* tersimpan untuk sebagian saja (1844-1897, 1926, 1928-1948, dalam ANRI) Sampai akhir masa kolonial Protestantse Kerk adalah gereja Kristen terbesar di Indonesia, dan dari semula mayoritas anggotanya adalah orang Indonesia. Maka notula *Kerkbestuur* merupakan sumber penting bagi penelitian sejarah golongan Kristen Protestan (Eropa dan Bumiputera) di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.

V. Lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh lain

1. *Amfioen Sociëteit* (Sositet Candu, 1745-1794) dan *Amfioen Directie* (1794-1808)

Pada zaman VOC, *amfioen* (candu, pada zaman itu kata Melayu yang lazim dipakai ialah *madat*) adalah salah satu hasil bumi yang terkenal di Pulau Jawa. Menurut catatan tahun 1628, candu termasuk produk-produk tanah Jawa yang kena bea masuk saat masuk pelabuhan Batavia. Sekitar tahun 1670 warga Batavia mulai mencampurkannya dengan tembakau. Campuran ini merupakan obat bius yang sangat adiktif, yang tidak hanya membuat pemakainya ketagihan, tetapi juga mendorongnya melakukan tindakan kriminal. Namun, VOC tetap mengimpor kuantitas besar candu dari Benggala, yang dilelang dan kemudian masuk pasaran lokal.[93]

Dari semula, candu biasanya diperdagangkan di Jawa oleh pedagang perantara warga Cina. Di samping mereka, makin lama makin banyak warga Eropa di Batavia yang aktif di bidang ini. Mereka membeli candu dari para pedagang Inggris atau India di Selat Malaka, lalu menjualnya dengan keuntungan besar. Pada tahun 1743 Pemerintah Agung mengirim beberapa komisaris ke Malaka untuk mengusut peranan mantan gubernur De Laver dan fiskal serta jaksa kota Malaka dalam penyelundupan candu.[94] Pada pertengahan tahun 1745 komisi ini melaporkan kepada Pemerintah Agung bahwa sejak tahun 1738 perdagangan candu swasta liar di Malaka makin meningkat dan 'di sana sudah merupakan perkara biasa'. Orang menyelundupkan juga produk-produk lain, yaitu timah, merica, dan gula. Tetapi, di samping rempah-rempah dari Maluku, candu merupakan mata perdagangan yang paling banyak menghasilkan keuntungan bagi VOC. Jadi, penyelundupannya oleh pihak ketiga sangat merugikan Kompeni.

Pada pertengahan abad ke-18 penyelundupan candu oleh penduduk Malaka dan Batavia yang makin menjadi-jadi itu mencetuskan diskusi. Bukankah lebih baik memperbolehkan orang swasta memasuki perdagangan candu? Pembebasan perdagangan mungkin akan menahan kemerosotan ekonomi kota Batavia, di mana berbagai rumah tinggal dan gedung perusahaan dagang notabene sudah seperti mau ambruk. Lapi pula, perdagangan candu oleh VOC juga mempunyai segi-segi yang merugikan Kompeni. Harga berfluktuasi, dan candu yang sudah terjual sering baru diambil oleh pembelinya (yang kebanyakan orang Cina) setelah mereka berhasil menjualnya kembali kepada pihak lain.

Gubernur Jenderal van Imhoff ingin menyelesaikan semua masalah itu sekaligus. Oleh karena itu, dengan dukungan pimpinan VOC di negeri Belanda, ia memilih mendirikan maskapai perdagangan bernama *Amfioen Sociëteit*, yang akan tunduk pada pengawasan pemerintah, namun milik swasta, yang dananya akan diperoleh dengan jalan emisi saham.[95] VOC akan memasok candu kepada *sociëteit* swasta ini dan akan mengurus transpor peti-peti candu ke Semarang, Surabaya, Makassar, dan lain-lain tempat. Dengan demikian VOC akan tetap berpartisipasi dalam perdagangan ini, sedangkan para pemilik saham

VOC di Republik yang ingin mempertahankan monopoli VOC di bidang ini akan tetap tenang, namun para pegawai Kompeni dan orang swasta diberi kesempatan untuk turut memetik keuntungan.

Pada tanggal 24 September 1745 Van Imhoff membicarakan rencananya dalam rapat Pemerintah Agung.[96] Ia mengemukakan bahwa dengan cara ini pemasaran terjamin (ditaksir setiap tahun Kompeni akan meraih keuntungan sebesar satu juta *gulden*), investasi para pemilik saham VOC akan tetap aman karena terjadi pemerataan risiko, sedangkan uang yang beredar di Batavia akan bertambah banyak dan kegiatan ekonomis akan meningkat. Dengan demikian, 'seluruh koloni akan ikut memetik manfaat tindakan ini'. Pada hari itu juga, Pemerintah Agung menyetujui proyek Van Imhoff. Sositetnya diberi oktroi yang berlaku lima tahun, mulai dari tanggal 1 September 1745.[97] Tanggal ini dapat dianggap sebagai tanggal permulaan berdirinya *Amfioen Sociëteit*. Kesempatan mendaftarkan diri untuk membeli saham terbuka pada tanggal 1 Oktober, dan hanya beberapa minggu kemudian ke-300 saham yang berharga 2.000 ringgit per saham sudah didaftar. Plakat berisikan naskah lengkap ke-42 pasal oktroi *Sociëteit* tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 November 1745.[98]

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam oktroinya, pimpinan *Amfioen Sociëteit* terdiri atas lima orang: seorang direktur, dua *hoofdparticipanten* (partisipan utama, dari golongan swasta di Batavia), satu orang kasir dan satu orang penata buku merangkap sekretaris. Pengurus harian ini bersidang secara teratur. Dalam tahun-tahun pertama, para partisipan utama (yaitu mereka yang memiliki minimal sebelas saham) sering berkumpul juga, bahkan beberapa kali sebulan. Rapat-rapat partisipan utama dihadiri (dan dibuka dengan doa) oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff selaku *opperdirecteur*, direktur utama. Hadir juga *directeur-generaal* Jacob Mossel (selaku direktur), yang merundingkan pengiriman candu ke kantor-kantor cabang.

Menurut oktroi, Sositet wajib membeli 1.200 peti setahun dari Kompeni dengan harga 450 ringgit per peti. Dalam enam bulan Sositet telah berhasil menjual 708 peti. Lima tahun kemudian keuntungan bersih sudah sebesar 150.000 ringgit setahun, dan peti yang dibeli meningkat menjadi 1.800 peti setahun.[99] Namun, masyarakat Batavia kurang menarik manfaat dari kegiatan ini, dan kegiatan dagang orang swasta tidak meningkat karenanya. Sebagian besar keuntungannya mengalir kepada pegawai-pegawai tinggi VOC (atau ahli-ahli waris mereka), walaupun mereka telah pulang ke tanah air. Pada tahun 1769 dari 300 saham 172 beredar di luar wilayah VOC, pada 1789 230. Pada 1801 (ketika Sositet sudah lama bubar) hanya 56 yang masih dimiliki oleh penduduk kota Batavia. Maka warga Batavia sendiri tidak menikmati dividennya, sehingga tujuan Sositet tidak tercapai.[100]

Oktroi *Amfioen Sociëteit* diperpanjang beberapa kali, disertai penyesuaian naskahnya. Namun, atas permintaan *Heren Zeventien*, perusahaan itu diperiksa oleh komisi yang bernama *Preparatoir Besogne* (Komisi Persiapan), kemudian oleh *Hoge Commissie* sendiri. Dalam laporan mereka kepada *Heren Zeventien* bertanggal 15 Januari 1795, Nederburgh dan Frijkenius memberitahukan bahwa, dalam rangka persiapan pembubaran *sociëteit* itu, pada tanggal 15 Maret 1794 mereka telah mengirim rancangan plakat penghapusannya kepada Pemerintah Agung. Pada hari itu juga pemerintah mengeluarkan plakatnya, yang resmi menyatakan pembubaran *Amfioen Sociëteit*.[101]

Semua kegiatan badan tersebut ditempatkan di bawah pengawasan *Amfioen Directie*. Oleh *Hoge Commissie* Direksi sementara ini diubah menjadi *Amfioen Directie voor rekening van de Compagnie* (Direksi Amfioen atas tanggungan Kompeni). Salah satu tugas terpentingnya menyangkut pembayaran ganti rugi kepada para pemegang saham. Modal Sositet yang telah dibubarkan itu disetor ke kas VOC, yang kemudian meneruskannya kepada para pemilik saham, yang sebagian besar tinggal di Eropa. Pembayarannya sering sangat terlambat. Di samping itu, *Amfioen Directie* bertugas meneruskan kegiatan dagang dan memperoleh keuntungan. Direkturnya diambil dari anggota *Hoge Regering*. Selain gaji tetap, direksi yang baru mendapat balas jasa berupa beberapa persen laba bersih. Dengan demikian gubernur jenderal dan *directeur-generaal* diberi kesempatan 'meningkatkan pendapatan sederhana yang mereka peroleh dari jabatannya'. Candu kembali dijual melalui lelang umum. Menurut perhitungan *Hoge Commissie*, jika terjual 950 peti saja Kompeni sudah akan meraih keuntungan lebih besar daripada yang dinikmatinya selama sepuluh tahun terakhir. Bersamaan dengan reorganisasi Sositet, pemerintah memberantas *morshandel* (penyelundupan) pada umumnya. Sejumlah plakat yang terkait dengan gejala itu mengalami perubahan. Selama itu jaksa yang bertugas menyita barang selundupan menerima sebagian hasil penjualan barang sitaan itu, dengan akibat mereka sendiri menarik manfaat dari kegiatan para penyelundup.[102] Pada tanggal 17 September 1808 Gubernur Jenderal Daendels membubarkan *Amfioen Directie*.

2. *Bataviase Bank van Lening* (pegadaian, 1746-1752); *Bank-Courant* dan *Bank van Lening* (1752-1794); *Bank van Lening* (1794-1818)

Pada tahun 1746 Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff bersama para anggota *Raad van Indië* sering membicarakan rencana-rencana yang bertujuan meningkatkan taraf ekonomi lokal kota Batavia. Wabah malaria tahun 1733 dan pembunuhan besar-besaran atas orang-orang Cina pada tahun 1740 ternyata sangat merugikan perdagangan. Van Imhoff mencari jalan keluar dengan membentuk badan-badan yang akan bertugas 'memperlancar pelayaran bebas dan kegiatan dagang kota ini dan menciptakan fasilitas untuknya'. Salah satu tindakan yang diambilnya ialah pengaturan kegiatan para makelar. Untuk seterusnya para makelar yang aktif di bidang perdagangan, wesel, asuransi, saham, kredit, dan sebagainya harus mendapat izin resmi dan wajib mengucapkan sumpah. Dua anggota *Raad van Indië*, Jacob Mossel dan Nicolaas Crul (anggota luar biasa) diangkat menjadi *Commissarissen over de Zaken van Commercie* (Komisaris Urusan Perdagangan) dengan tugas mempersiapkan tindakan-tindakan kongkret. Mereka mengajukan dua usul. Pertama, harus dibentuk *College van Commissarissen van Zee en Commercie Zaken* (Dewan Komisaris Urusan Lautan dan Perdagangan), yang akan menyelesaikan sengketa antara pemilik kapal, awak kapal, dan pedagang swasta. Sama seperti para komisaris untuk perkara hukum ringan, *Commissarissen van Zee en Commercie* tidak boleh menjatuhkan hukuman atas nama *Staten Generaal* (pemerintah tertinggi di negeri Belanda), karena keduanya merupakan pengadilan tingkat rendah.[103] *College* ini sudah dihapuskan pada tahun 1755 karena perdagangan orang swasta dibatasi lagi. Arsipnya dimasukkan ke dalam arsip *College van Schepenen*.[104]

Pada tahun 1746 pemerintah menganggap perlu mengambil tindakan ketiga. Pada tanggal 23 Agustus orang membicarakan rancangan peraturan kantor pos baru dan *Bank van Lening* (pegadaian). Ordonansi definitif ditetapkan tanggal 26 Agustus. Pengaruh *Hoge Regering* atas para pengurus *Bank van Lening* cukup besar. Ketua haruslah seorang anggota Raad van Indië. Ia didampingi enam komisaris, di antaranya empat pegawai VOC dan dua orang swasta. Mereka harus berkumpul minimal sekali dalam sebulan. Bila terjadi lowongan, tempatnya diisi lagi oleh *Hoge Regering*.[105] Dalam pada itu, Van Inhoff, yang boleh dikatakan adalah pengurus sebenarnya pegadaian itu, memilih sebuah rumah di sebelah timur Tijgersgracht, yang terletak di sebelah kanan berseberangan dengan Balai Kota, menjadi kantor bank tersebut.[106]

Pada tanggal 1 Desember 1746 *Bank van Lening* dibuka. Bank itu memberikan persekot kepada para pedagang swasta dengan agunan emas, perak, permata, barang perdagangan, kain, perabot rumah tangga murahan, dan sebagainya. Di samping itu, *Bank van Lening* menyediakan kredit pembelian rumah.

Dalam waktu singkat ratusan orang bersedia berpartisipasi dalam bank itu, yang adalah bank Barat yang pertama di Asia Tenggara. Per Januari 1758 modalnya sudah sebesar 1.315.190 ringgit, yang disediakan oleh 197 orang, semuanya berkebangsaan Eropa. Dengan uang itu bank memberikan pinjaman uang yang jumlahnya 248.360 ringgit, dengan agunan sebanyak 800 rumah. Tetapi bagian terbesar modalnya, yaitu 750.000 ringgit, didepositokan pada VOC dengan bunga 4½% per tahun. Jumlah uang kontan dalam kas saat itu berjumlah 314.627 ringgit, dan uang lelang yang belum diterima berjumlah 23.781 ringgit.[107] Jadi bagian terbesar keuntungan yang diraih oleh bank ini berasal dari uang yang telah dipinjamkan kepada Kompeni dan dari bunga pinjaman kredit rumah. Bunga pinjaman dengan agunan kain juga penting, khususnya bagi para pedagang berkebangsaan Asia.

Pada tanggal 2 Juni 1752 (sesudah kematian Van Imhoff) Pemerintah Agung membicarakan kondisi-kondisi yang harus berlaku bagi sebuah *wisselbank* (bank wesel), lebih tepat *Bank-Courant*, yang mulai tanggal 1 September akan bertindak sebagai bank deposito dan bank pengedar uang. Pada tanggal 5 September bank ini melebur dengan *Bank van Lening* menjadi *Bank-Courant en Bank van Lening*. Tujuannya tetap sama, yaitu mempermudah transaksi keuangan bagi para pedagang swasta.

Wisselbank ini mengeluarkan sertifikat kepada orang swasta yang tidak suka menyimpan sejumlah besar uang tunai (uang logam) di rumah sendiri. Banyak pedagang mempunyai seorang kasir, yang harus mengawasi peti uang mereka. *Bank-Courant* bertujuan memberikan fasilitas bagi orang swasta yang memiliki omzet besar dan karenanya harus melakukan transaksi keuangan dalam jumlah banyak. Mereka dapat membawa semua jenis uang logam ke bank, lalu bank menukarnya dengan *bankbrieven* (surat bank) sebesar 1.000, 500 atau 100 ringgit. Surat tersebut ditulis di atas kertas sebesar setengah lembar folio, setengah lembar kecil, dan seperempat lembar kecil, yang dibubuhi meterai.[108] Sertifikat atau surat bank ini memakai nama penerimanya dan dapat diserahkan kepada pihak ketiga atau ditukar dengan uang tunai di bank sendiri.

Lama-kelamaan, *Bank-Courant* menjadi korup. Dalam surat mereka tertanggal 22 Desember 1791 *Heren Zeventien* meminta *Hoge Commissie* yang baru saja dibentuk agar mengusut hilangnya 63.000 ringgit dari kas bank pada masa kasir E.M. de Roth. Anggota *Hoge Commissie* itu memeriksa sendiri buku-buku kas. Ternyata tanggal uangnya ditransfer memang dapat dipastikan, tetapi alasan transfernya tetap tidak jelas. Maka diangkat komisi khusus, yang pada tanggal 8 Juni 1794 menyampaikan laporan yang memuaskan. Sesudah itu, uang yang hilang itu diambil dari harta warisan De Roth, yang telah meninggal dunia dua tahun sebelumnya.[109]

Pada tanggal 4 Desember 1793, antara lain atas permintaan Siberg, *Hoge Commissie* membicarakan soliditas bank gabungan itu, yang sudah menjadi masalah. Bukankah lebih baik kalau, untuk menyehatkan *Bank van Lening*, *Bank-Courant* dibubarkan saja? Karena pertanyaan ini menyangkut persoalan penting, mereka meminta pendapat Pemerintah Agung. Pada tanggal 12 Maret 1794 (bank sudah ditutup beberapa minggu sebelumnya) sebuah komisi khusus menyatakan bahwa penghapusan *Bank-Courant* sudah tidak terelakkan lagi. Tujuan semula sudah tidak berlaku lagi, disebabkan 'semakin merosotnya keadaan penduduk Batavia'. Sudah bertahun-tahun lamanya bank itu tinggal namanya saja, sebab tidak memiliki modal yang dapat mengimbangi sertifikat-sertifikat yang diedarkan olehnya. Direksi telah bertindak dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengeluarkan sejumlah besar surat bank tanpa jaminan.[110] Tiga minggu kemudian *Hoge Commissie* memutuskan untuk membubarkan *Bank-Courant* yang sudah tidak bernilai lagi dan menguasakan pemerintah mencabut dan membakar semua surat bank yang masih beredar (5 April 1794). Bersamaan dengan itu dicetak surat kredit seharga 600.000 ringgit. Warga Batavia diberi waktu dua bulan untuk menyerahkan sertifikat bank yang masih mereka pegang dan menukarnya dengan surat kredit.

Tinggal *Bank van Lening*, yang menghadapi masalah besar, yaitu agunan berupa rumah yang sudah rusak, sehingga harganya berkurang. *Hoge Commissie* mengusulkan agar milik bank itu disehatkan, tetapi menurutnya itu tidak mencukupi. Direksi bank ini pun telah bertindak dengan sewenang-wenang, khususnya karena memberikan pinjaman bertentangan dengan aturan yang berlaku untuknya. Maka pada hemat komisi seluruh direksi dan pengelolaan bank itu harus beralih ke tangan Kompeni dan dipertanggungjawabkan kepada Kompeni. Namun, sebaiknya orang swasta (*burgers*) diikutsertakan sebagai anggota pengurusnya. Maka seorang anggota Pemerintah Agung diangkat menjadi direktur. Ia didampingi oleh empat komisaris (dua pegawai Kompeni dan dua orang swasta), seorang kasir, seorang penata buku merangkap sekretaris dan penyimpan agunan, seorang juru taksasi, seorang pesuruh merangkap pemimpin lelang, dua juru tulis, dan seorang pegawai kantor. Gaji mereka dibayarkan lewat kantor administrasi VOC dari bunga uang yang dipinjamkan oleh bank. Bank dikuasakan pula mengadakan lelang (sebelumnya lelang hanya boleh diadakan oleh juru lelang kota).[111]

Pada tanggal 21 Mei 1794 *Hoge Commissie* memutuskan bahwa para komisaris bank harus merangkap penyimpan agunan, karena uangnya disimpan di beberapa tempat, sehingga kemungkinan hilangnya uang cukup besar. Walaupun kondisi bank yang merana, apalagi sejak hampir tertutupnya jalur perdagangan dengan Eropa pada tahun 1795, pada tahun 1799 *Hoge Commissie* tetap mau mengisi lowongan dalam komisariat bank itu.[112] Sepuluh tahun kemudian Daendels memutuskan untuk mengusut pinjaman-pinjaman bank dan kantor lelang.[113] Pada tanggal 14 Juli 1809 direktur dan kedua komisaris yang masih menjabat diberhentikan. Didirikan bank baru dengan nama yang sama; sekretaris dan juru-juru tulis bank lama dapat terus bekerja. Dikeluarkan instruksi baru; di dalamnya ditentukan bahwa bank yang baru itu akan dipimpin oleh dua orang komisaris dan seorang sekretaris yang merangkap kasir, penata buku, dan penyimpan agunan. Sekretaris ini diampingi oleh seorang juru taksir, empat juru tulis, dan seorang pelapor.

Sesuai dengan ketentuan dalam konvensi suplementer yang diikat negeri Belanda dengan Inggris tanggal 24 Juni 1817, *Bank van Lening* (*Lombard-Bank*, pegadaian) diambil alih oleh gubernemen Hindia Belanda bersama seluruh untung ruginya. Sampai tanggal 18 Juni 1818 orang diberi kesempatan menukar kertas bank yang masih beredar. Sesudahnya kertas itu akan tidak berharga lagi dan banknya sendiri akan dibubarkan. Sepuluh tahun kemudian didirikan lembaga penggantinya, yaitu *Javasche Bank*.

3. Koleksi Engelhard

Nicolaus (Nicolaas) Engelhard, lahir Arnhem sek. 1 Desember 1761, berangkat ke Asia pada tahun 1777 dengan pangkat asisten. Tiga tahun kemudian ia naik pangkat dan menjadi *onderkoopman*. Berturut-turut ia menjadi administratur gudang-gudang pada *Waterpoort* (Pintu Air, 1781), administratur II gudang-

gudang di Pulau Onrust (1784), dinaikkan pangkat menjadi *koopman* (14 Juli 1785), menjadi administratur I di Pulau Onrust (23 Februari 1787), syahbandar dan *licentmeester* dengan gelar dan pangkat *opperkoopman* (4 Agustus 1789), *gecommitteerde tot de zaken van den inlander* (wakil untuk urusan orang pribumi, 4 Oktober 1791) merangkap *heemraad* dan *buitenregent* rumah-rumah sakit di tahun yang sama, ketua *College van Heemraden* (1800), anggota luar biasa *Raad van Indië* (April 1801), gubernur pantai timurlaut Pulau Jawa (1801-1808). Ia dibebastugaskan oleh Daendels pada tanggal 8 April 1808. Di kemudian hari ia masih menjabat ketua komisi untuk serahterima Kepulauan Maluku (1817-1818) dan anggota Komisi Tinggi untuk pelantikan Sultan Yogyakarta (1826). Ia meninggal di Bogor pada tanggal 31 Mei 1831.

Bagian terbesar dokumen-dokumen resmi yang termasuk koleksi ini menyangkut masa jabatan Engelhard sebagai gubernur pantai timurlaut Pulau Jawa. Selain itu, koleksi ini mengandung korespondensi yang dilakukannya dengan sejumlah tokoh sewaktu ia tidak memegang jabatan pemerintahan (sejak tahun 1808), khususnya dalam kurun waktu 1816-1831. Di dalamnya terdapat banyak data-data mengenai kepemilikan tanah di daerah sekitar kota Batavia dan di Priangan (Sukabumi). F. de Haan menerbitkan karangan mengenai asal-usul dokumen-dokumen dalam koleksi Engelhard[114]

Catatan-catatan

1 Kepustakaan mengenai Batavia dalam: E. Ebing dan Youetta de Jager eds, *Batavia – Jakarta 1600-200. A bibliography* (Leiden 2000).

[2] Kepustakaan yang disajikan dalam catatan-catatan kaki tidak lengkap. Kami hanya menyajikan kepustakaan yang memang dipakai waktu karangan ini ditulis.

[3] J.A. van der Chijs ed., *Nederlandsch-Indisch Plakkaatboek 1602-1811* (17 jilid; Batavia dan 's-Gravenhage 1885-1900).

[4] Pieter van Dam, *Beschryvinge van de Oostindische Compagnie*, F.W. Stapel dan C.W.Th. van Boetzelaer eds. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 63, 68, 74, 76, 83, 87, 96 (7 jilid; 's-Gravenhage 1927-1954), derde boek, 41. Dalam menyusun pasal ini penulis kerja sama dengan Femme Gaastra, Frans van Dijk, Louisa Balk, dan Diederick Kortlang.

[5] Dokumen-dokumen yang dikirim ke tanah air disebut *Overgekomen Brieven en Papieren* (Surat dan dokumen yang telah dikirim kemari). Semuanya dapat disimak dalam Nationaal Archief di Den Haag, sedangkan inventarisnya dapat dipelajari lewat www.tanap.net.

[6] *Bevindingen op de eisen* ini disimpan (serinya tidak lengkap) dalam arsip *Kamer* Zeeland: Nationaal Archief, VOC 13472-13508.

[7] Lihat mengenai sistem pembukuan ini: J.P. de Korte, *De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie*. Werken uitgegeven door de vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 17 (Leiden 1984); F.S. Gaastra, *Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers 1672-1702* (Zutphen 1989).

[8] W.Ph. Coolhaas dan J. van Goor eds, *Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie*. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164, 193, 205, 232, 250, 257 dan 258 (13 jilid; 's-Gravenhage 1960-2007).

[9] J.A. van der Chijs ed., *Realia. Register op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632-1805* (3 jilid; Den Haag dan Batavia 1882-1885).

[10] J.A. van der Chijs et al. eds, *Daghregisters gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlants-India* (31 jilid; Batavia dan 's-Gravenhage 1888-1931).

[11] Van der Chijs, *Nederlandsch-Indisch Plakaatboek* (selanjutnya: N.I.P.).

[12] J.E. Heeres dan F.W. Stapel eds, *Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten*. Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 57, 87, 91, 93 en 96 ('s-Gravenhage 1907-1955).

[13] Rapat pertama bersidang pada tanggal 3 Desember 1791 lepas pantai Texel (pulau di negeri Belanda bagian utara). Lihat ANRI, Archief Hoge Commissie (selanjutnya Archief HC), no. inv. 1, fol. 1.

[14] Informasi mengenai komisi tersebut dan tentang instruksi yang diberikan kepadanya terdapat dalam: S.C. Nederburgh, *Echte stukken betreffende het volbragt onderzoek der verrichtingen van de Generale Commissie in den jare 1791 benoemd over de O.I. bezittingen van den Staat en de Kaab de Goede hoop, benevens den finalen uitslag van hetzelve* ('s-Gravenhage 1803).

[15] *Ibidem*. Jilid pertama notula komisi ini seluruhnya membahas kegiatan dan tindakan kedua *commissaris-generaal* di Afrika Selatan.

[16] Notula dan resolusi-resolusi rapat-rapat gabungan itu dapat ditemukan dalam inventaris Archief Hoge Regering (selanjutnya: Archief HR), seri-seri 'minuut-generale notulen' (notula yang belum disahkan) no. inv. 206 dyb.; 'net-generale notulen' (notula yang sudah disahkan, no. inv. 379 dyb.), 'minuut-generale resoluties' (no inv. 765 dyb.), 'net-generale resoluties' (no. inv. 1135 dyb.) bersama 'bijlagen generale resoluties' (no. inv. 4532). Lihat juga no. inv. 9 Archief HC.

[17] ANRI, Archief HC, no inv. 84, Laporan HC kepada *Heren Zeventien*, 14 Januari 1795.

[18] Lihat Archief HR, bab 'Bijzondere onderwerpen', pasal 'Financiën'.

[19] Colenbrander, *Koloniale Geschiedenis* ('s-Gravenhage 1925), jilid kedua, 214; J. la Bree, *De rechterlijke organisatie van rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw* (Rotterdam/'s-Gravenhage 1951), 57.

[20] Van Dam, *Beschryvinge*, derde boek, 83.

[21] ANRI, Archief HR no. inv. 877 fols. 343-356, res. HR, 3 Agustus 1668; instruksi kepada *opperkooplieden* di Kasteel

Batavia, *koopman* dalam *soldijkantoor*, dan sekretaris *Raad van Justitie* berkenaan dengan penagihan harta milik yang telah disita, denda, harta yang dibebani, dll., yang termasuk wewenang *Raad van Justitie*, atau pembebasan darinya.

[22] M.A.P. Meilink-Roelofsz. et al. eds, *De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1795)* ('s-Gravenhage 1992), 324-329.

[23] N.I.P. I, 472-594.

[24] ANRI, Archief HR, no. inv. 1179, fol. 261-275, resolusi HR 15 Agustus 1809.

[25] N.I.P., 127-132.

[26] Informasi lebih terinci terdapat dalam: La Bree, *De rechterlijke organisatie*, 108-132.

[27] ANRI, Archief HR no. inv. 891, fol. 239-244, resolusi 4 Juni 1679; *idem* 1001, fol. 239-240, resolusi HR 28 Mei 1745; fol. 245 (30 Mei) dan fol. 251-255 (4 Juni).

[28] N.I.P., I, 133-137.

[29] Yaitu budak, atau budak yang sudah dimerdekakan, dari Afrika; biasanya mereka diimpor dari Mombasa (pelabuhan di pantai Kenya).

[30] Nationaal Archief, VOC no. inv. 697, resolusi HR 12 Desember 1681.

[31] Nationaal Archief, VOC no. inv. 688, resolusi HR 31 Mei 1673.

[32] ANRI, Archief HR, no. inv. 891, fol. 228-229, resolusi HR 26 Mei 1679.

[33] ANRI, Archief HR, no. inv. 892, fol. 351-353, resolusi HR 29 Mei 1680.

[34] N.I.P. XV (1808-1809), 552.

[35] J.K.J. de Jonge, *De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java*, jilid II ('s-Gravenhage/Amsterdam 1870), 56.

[36] N.I.P. I, 173-187. Bnd. naskah peraturan ini dengan naskah *Bataviase Statuten*; *ibidem* 513-525.

[37] A.A. Buyskes, *Academisch proefschrift over de Weeskamer en het Collegie van Boedelmeesteren te Batavia* (Leiden 1861), 10.

[38] Van Dam, *Beschryvinge*, derde boek, 115-116.

[39] Mengenai prosedur dan tugas selengkapnya Balai Yatim Piatu lihat *Bataviase Statuten* tahun 1642 dalam N.I.P. I, 513-520. Di 525-530 prosedur dan tugas Balai Harta Peninggalan.

[40] *Gedenkschrift samengesteld door de weeskamer te Batavia naar aanleiding van haar 300-jarig bestaan op 1 october 1924* (Weltevreden 1924), bab I 'De tijd vóór 1818', oleh E.C. Godée Molsbergen, 10.

[41] *Ibidem*, bab II, 'Van 1818 tot heden', 24.

[42] ANRI, Archief HR no. inv. 876, fol. 389, resolusi HR 19 September 1664.

[43] ANRI, Archief HR no. inv. 884, fol. 245, resolusi HR 19 Agustus 1672.

[44] ANRI, Archief HR no. invf. 891 (tanpa nomor halaman), resolusi HR 13 Oktober 1679.

[45] ANRI, Archief HR no. inv. 892, fol. 522-524, resolusi HR 23 Juli 1680. Bdk. Van Dam, *Beschryvinge*, derde boek, 117 cat. kaki 1; N.I.P. II, 52 dyb.

[46] ANRI, Archief HR no. inv. 892, fol. 531, resolusi HR 28 Juli 1680.

[47] ANRI, Archief HR no. inv. 892, fol. 533-534, resolusi HR 30 Juli 1680.

[48] ANRI, Archief HR no. inv. 899, fol. 124-125, resolusi HR 23 Maret 1685.

[49] ANRI, Archief Heemraden, resolutieboek 1716-1717, fol. 246, 16 Jan. 1717, dengan acuan ke resolusi-resolusi *Hoge Regering* bertanggal 23 Maret 1685 dan 16 Maret 1700.

[50] Umpamanya, pada tanggal 30 Oktober 1682 mantan gubernur Ambon, Robbert de Vicq, dipilih menjadi ketua, dan pada tanggal 27 Februari 1700 mantan gubernur Ternate, Cornelis van der Duyn. ANRI, Archief Heemraden, resolutieboek 1696-1702, fol. 249, 27 Febr. 1700.

[51] ANRI, Archief Heemraden, resolutieboek 1718-1722, fol. 464, 26 Oktober 1720. *Gecommitteerde* tersebut ialah Reijkert Heer, yang dalam bulan September 1727 melepaskan fungsinya karena telah diangkat menjadi kepala kantor VOC di Banten. Daftar orang yang pernah menjabat *commissaris* terdapat dalam F. de Haan, *Priangan: De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811*, 4 jilid (Batavia dan 's-Gravenhage 1910), bagian pertama, II, 1 e.v.

[52] ANRI, Archief Heemraden, resolutieboek 1718-1722, fol. 408, 3 Agustus 1720.

[53] ANRI, Archief Heemraden, resolutieboek 1705-1707, fol. 301, 11 Des. 1706.

[54] J.A. van der Chijs, *Inventaris van 's lands archief te Batavia (1602-1816)* (Batavia 1882), 131.

[55] ANRI, Archief HR no. inv. 1177, fol. 138-139, resolusi HR 7 Februari 1809.

[56] *Ibidem*, fol. 460-461, resolusi HR 28 Maret 1809.

[57] *Ibidem*, fol. 500, resolusi HR 28 Maret 1809.

[58] Keterangan terinci dalam La Bree, *De rechterlijke organisatie*, 136-137.

[59] F. de Haan, *Oud Batavia* (Batavia 1922), jilid II, 313-314 cat. kaki 1; N.I.P III, 140 dyb.; Van Dam, *Beschryvinge*, derde boek, 119-121.

[60] NA, VOC no. inv. 678, resolusi HR 27 Februari 1660.

[61] La Bree, *De rechterlijke organisatie*, 133-134.

[62] N.I.P. I, 438-445. Dalam *Bataviase Statuten* tahun 1642 college ini dinamakan: *Boedelmeesters der Chineesche als andere vreemde sterfhuysen op Batavia*; *ibidem*, 525.

[63] H.E. Niemeijer, *Batavia. Een koloniale samenleving in de zeventiende eeuw* (Amsterdam 2005), 78-79.

[64] ANRI, Archief HR no. inv. 1009, fol. 525, resolusi HR 2 Juni 1752.

[65] Van Dam, *Beschyvinge*, derde boek, 121-122.

[66] N.I.P. I, 454-456.

[67] ANRI, Archief HR no. inv. 892, fol. 605-611, resolusi HR 30 Agustus 1680.

[68] Dalam *Gedenkschrift samengesteld door de weeskamer te Batavia*, 60-63 terdapat tinjauan keuangan dari abad ke-19.

[69] Tidak disebut dalam F. Valentyn, *Oud en Nieuw Oost Indiën* (Dordrecht 1724-1726), IV/A, 391. Dalam arsip tidak tersimpan protokol-protokol Van Kerchem.

[70] Valentyn, *Oud en Nieuw Oost Indiën*, IV/A, 409.

[71] N.I.P. I, 486; IX, 103.

[72] ANRI, Archief HR no. inv. 812, fols. 253-254, resolusi HR 2 November 1668.

[73] N.I.P. I, 486, *Bataviase Statuten*.

[74] N.I.P. III, 93, 9 Juni 1682.

[75] NA, VOC no. inv. 684, resolusi HR 24 September 1669.

[76] NA, VOC no. inv. 686, resolusi HR 11 Agustus 1671.

[77] NA, VOC no. inv. 690, resolusi HR 14 Juli 1675.

[78] NA, VOC no. inv. 687, resolusi HR 1 April 1672.

[79] NA, VOC no. inv. 697, resolusi HR 30 Januari 1682.

[80] NA, VOC no. inv. 697, resolusi HR 20 dan 25 Februari 1682.

[81] ANRI, Archief HR no. inv. 892, fol. 441-442, resolusi HR 18 Juni 1680.

[82] Pada kenyataannya jumlah mereka empat orang, sebab yang keempat berkantor di luar kota.

[83] *Staatsblad* (Lembaran negara) 1822, no. 11.

[84] J. Mooij ed., *Bouwstoffen voor de geschiedenis der Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië*, 3 jilid (Batavia 1927-1931).

[85] H.E. Niemeijer, *Calvinisme en koloniale stadscultuur. Batavia 1619-1725* (Diss. VU, Amsterdam 1996); Th. van den End, *Ragi Carita, Sejarah Gereja di Indonesia*, I (Jakarta 1980/ [11] 2005), pasal 13-16.

[86] Publikasi surat-surat dan laporan-laporan majelis-majelis gereja di Ambon, Banda, dan Ternate (direncanakan empat jilid) oleh H.E. Niemeijer sedang dalam persiapan.

[87] NA, VOC no. inv. 687, resolusi HR 6 dan 10 Januari 1673.

[88] NA, VOC no. inv. 693, resolusi HR 9 Januari 1678.

[89] Niemeijer, *Calvinisme*, 275-295.

[90] Informasi dalam pasal ini diambil dari: H. E. Niemeijer, 'The first Protestant Churches on Java's Northeast Coast: a Church Report from Rev. J.W. Swemmelaar', dalam: *Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken*, tahun ke-5 no. 2 (1998), 53-63.

[91] Informasi dalam pasal ini diambil dari: M. de Bruijn, 'The Lutheran congregation at Batavia, 1743-1800', dalam: *Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken*, tahun ke-2 no. 1 (1995), 1-26.

[92] Lihat C.W.Th. van Boetzelaer, *De Protestantse Kerk in Nederlandsch-Indië, haar ontwikkeling van 1620-1939* ('s-Gravenhage 1947); Th. van den End, *Ragi Carita*, II, pasal 32.

[93] Niemeijer, *Batavia*, 104.

[94] ANRI, Archief HR no. inv. 1001 fol. 487-492, resolusi HR 16 November 1745; diadakan rapat luar biasa untuk membicarakan laporan para komisaris Cluysenaar dan Jongsma mengenai kegiatan mereka dalam dan berkenaan dengan gubernemen Malaka.

[95] Lihat juga J.E. Heeres, 'De "consideratiën van Van Imhoff"', Bijdragen tot de taal,- land en volkenkunde van Nederlandsch-Indië (BKI), 66 (1912), 441-621, khususnya 499-500; J.C. Baud, 'Proeve van eene geschiedenis van den handel en het verbruik van opium in Nederlandsch-Indië, BKI 1 (1853), 79-220; E. van Vugt, *Wettig opium: 350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische archipel* (Haarlem 1985).

[96] ANRI, Archief HR no. inv. 1001 fol. 487-392, resolusi HR 24 September 1745. N.I.P. V, 276-280.

[97] Pada tanggal 19 Oktober berikutnya *Hogere Regering* memutuskan memperpanjang masa berlaku oktroinya menjadi sepuluh tahun (1 September 1745 – 1 September 1755).

[98] Naskahnya dalam: Baud, 'Proeve', 200-210.

[99] ANRI, Archief Amfioen Sociëteit no. inv. 1, fol. 27, resolusi Amfioen Sociëteit 1 April 1747.

[100] Analisis keuntungan yang diraih oleh *Amfioen Sociëteit* dan orang-orang yang menarik manfaat darinya disajikan dalam: F.S. Gaastra. 'De Amfioen Sociëteit. Een geprivilegieerde handelsmaatschappij onder de vleugels van de VOC, 1745-1794', dalam: M.A. Ebben en F.P. Wagenaar eds, *De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek*, Leidse Historische Studiën 10 (Leiden 2006), 101-115.

[101] ANRI, Archief Hoge Commissie no. inv. 84, fol 108-123, laporan HC kepada *Heren Zeventien*.

[102] *Ibidem*.

[103] ANRI, Archief HR no. inv. 1002, fol. 709, resolusi HR 29 November 1746.

[104] Reglemen dewan ini disahkan oleh Pemerintah Agung pada tanggal 14 November 1746. Bdk. N.I.P. V, 423, yang *sub* tanggal 15 November 1746 hanya menyebut rumus sumpah untuk *waterschout* (kepala polisi laut) para *Commissaris voor Zee en Commercie*.

[105] ANRI, Archief HR no. inv. 1002, fol. 376-377, resolusi HR 12 Agustus 1746; fol. 398-399, 23 Agustus; fol. 433-439, 26 Agustus.

[106] N.P. van den Berg, *De Bataviasche Bank-Courant en Bank van Lening, 1746-1794*, Amsterdam 1870. Saat menulis buku ini, Van den Berg belum menemukan arsip bank ini.

[107] ANRI, Archief Bank van Leening no. inv. 7, fol. 196-198.

[108] ANRI, Archief HR no. inv. 1009, fol. 525-539, resolusi 2 Juni 1752.

[109] ANRI, Archief HC no. inv. 84, fol. 124-174, laporan HC kepada *Heren Zeventien* tgl. 15 Januari 1795.

[110] Lihat juga F. de Haan, *Oud Batavia*, jilid II, 373-375.

[111] Lihat di atas, cat. kaki 105.

[112] ANRI, Archief HC no. inv. 13, resolusi HC 14 Februari 1799.

[113] ANRI, Archief HR no. inv. 1177, fol. 479, resolusi HR 28 Maret 1809.

[114] F. de Haan, 'De Historie van een oudgast', in: *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, jilid XLII (1901), 195 dyb. Lihat juga: F. de Haan, *Priangan*, eerste deel, I, 77 dyb. (khususnya hlm. 83-84).